

LAKIP

BPAFK Jakarta

2024



081804640406



Jl. Percetakan Negara No.23 Jakarta

www.bpafkjakarta.id

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkat dan rahmat Nya Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Jakarta telah menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024. Laporan ini merupakan bagian dari upaya Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Jakarta dalam rangka penguatan sistem akuntabilitas kinerja seperti yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Jakarta sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis dari Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan RI dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan melalui perjanjian kinerja yang telah diperjanjikan sebelumnya yang disusun dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Jakarta ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik sebagai informasi maupun evaluasi kinerja pada tahun 2024 serta dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan tahun yang akan datang.

Jakarta, 10 Januari 2025

Kepla Balai Pengamanan Alat
dan Fasilitas Kesehatan Jakarta,



Subhan, ST.M.Si.

NIP.197611122005011003

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Jakarta ini merupakan salah satu media penyampaian capaian kinerja yang telah dirangkum sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Jakarta Tahun Anggaran 2024 kepada Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan RI dan seluruh pemangku kepentingan baik yang terkait langsung maupun tidak langsung serta merupakan sumber informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 237 Tahun 2024 tanggal 30 Mei 2024 BPAFK Jakarta ditetapkan menjadi Satker Pengelola Pola Keuangan Badan Layanan Umum (PPKBLU), sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2024 ada perubahan atau perbedaan Indikator Kinerja Utama (IKU) jika dibandingkan dengan tahun 2023, Indikator kinerja utama pada tahun 2024 ada 20 indikator kinerja utama dan dilakukan evaluasi secara berkala setiap triwulan, dari hasil evaluasi Indikator Kinerja Utama periode Januari 2024 sampai dengan Desember 2024 terdapat 13 indikator kinerja utama yang mencapai target melebihi dari 100% diantaranya yaitu :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) target 82 tercapai 89,25 atau (108,84%).
2. Perolehan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) target Rp29.311.918.800,- tercapai sebesar Rp32.138.299.747,- atau (109,64).
3. Persentase ketepatan waktu penerbitan sertifikat/LHU sesuai SPM target 75% tercapai 77% atau (102,67%).
4. Persentase peralatan yang telah dikalibrasi target 65% tercapai 77,8% atau (119,69%).
5. Persentase SDM ASN yang telah mengikuti pelatihan target 95% tercapai 97% atau (102,11%).
6. Persentase ketepatan waktu pelayanan target 80% tercapai 86% atau (108%).
7. Kenaikan nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) target 5 Poin tercapai 6 atau (120).
8. Jumlah alat kesehatan yang diuji produk post market target 50 tercapai 55 atau (110%).
9. Jumlah alat kesehatan yang dilakukan kalibrasi target 45000 tercapai 49938 atau (110,97%).

10. Persentase sarana distribusi alat kesehatan non-PIE yang diinspeksi paska sertifikasi CDAKB target 30% tercapai 33% atau (110%).
11. Nilai kinerja penganggaran BPAFK Jakarta target 80,1 tercapai 94,72 atau (118,25%).
12. Persentase realisasi target pendapatan BLU target 95% tercapai 109,64% atau (115,41%).
13. Persentase Realisasi Anggaran target 96% tercapai 96,60 atau (100,63%).

Pagu anggaran DIPA Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Jakarta untuk Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp52.130.975.000,- terdiri dari : Rupiah Murni (RM) sebesar Rp19.687.536.000,- dan PNBPN BLU sebesar Rp32.443.439.000,- .

Realisasi sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 sebesar Rp52.130.975.000,- atau 96,60%, realisasi sumber dana dari rupiah murni sebesar Rp19.127.912.381,- atau sebesar (97.16%), realisasi sumber dana dari PNBPN BLU sebesar Rp31.231.505.620,- (96,26%).

Demikian rincian laporan Realisasi sesuai sumber dana dan capaian indikator kinerja yang ada di BPAFK Jakarta.

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	2
Ringkasan Eksklusif	3-4
Daftar Isi	5
Bab I Pendahuluan	6
A. Latar Belakang	6
B. Penjelasan Umum Organisasi	7
C. Aspek Strategis Organisasi serta permasalahan Utama (Strategic Issued) yang sedang dihadapi organisasi	10
D. Sistematika Penulisan	12
Bab II Perencanaan & Perjanjian Kinerja	14
II.1 Perencanaan Kinerja	14
II.2 Perjanjian Kinerja	17
Bab III Akuntabilitas Kinerja	19
A. Capaian Kinerja Organisasi	18-61
A.1. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini	
A.2. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	
A.3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	
A.4. Membandingkan Realisasi Kinerja tahun ini dengan Standar Nasional (Jika ada)	
A.5. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan.	
A.6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	
A.7. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	
BAB IV PENUTUP	63
LAMPIRAN : 1. Perjanjian Kinerja	64-66
2. Realisasi Anggaran	67-70
3. SK Tim LAKIP	71-74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Jakarta, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, senantiasa berusaha melaksanakan sistem kerja pemerintahan secara bijaksana, akuntabel, transparan, efektif, dan efisien. Hal ini sesuai dengan prinsip *good governance* seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Laporan kinerja Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Jakarta disusun berdasarkan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan bersama Kepala Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Jakarta, terdiri dari 2 (dua) Program, yaitu Program Pelayanan Kesehatan dan JKN dan Program Dukungan Manajemen.

Program Pelayanan Kesehatan dan JKN tersebut terbagi lagi atas 9 (sembilan) sasaran program, yaitu Peningkatan Pengawasan Alat Kesehatan (Alkes) dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), a. Terwujudnya peningkatan kepuasan stakeholder, b. Terwujudnya pengelolaan keuangan yang sehat dan akuntabel, c. Peningkatan cakupan jenis pelayanan sarana, prasarana, dan alat SPA, d. Peningkatan ketercapaian standar pelayanan minimum, e. Meningkatnya kualitas sarana, prasarana, dan alat (SPA) fasilitas pelayanan kesehatan rujukan, f. Terwujudnya pemenuhan SDM yang kompeten, g. Terselenggaranya pelayanan Center of Excellence di BPFK secara optimal, h. Mempunyai tata kelola keuangan melalui badan layanan umum, i. Meningkatnya pengawasan sarana dan produk alat kesehatan dan PKRT.

Program Dukungan Manajemen terdiri Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan dan Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Adapun Indikator Kinerja Utama untuk sasaran program tersebut terdiri dari 20 (Dua puluh) indikator, yaitu:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
2. Perolehan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)
3. Penambahan ruang lingkup pelayanan yang terakreditasi

4. Penambahan ruang lingkup pelayanan
5. Persentase ketepatan waktu penerbitan sertifikat/LHU sesuai SPM
6. Persentase peralatan yang telah dikalibrasi
7. Persentase SDM ASN yang telah mengikuti pelatihan
8. Terselenggaranya Layanan Unggulan bertaraf Internasional
9. Persentase ketepatan waktu pelayanan
10. Terselenggaranya integrasi sistem informasi layanan berbasis digital
11. Kenaikan nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
12. Jumlah prototipe produk alkes yang diuji BPAFK
13. Jumlah alat kesehatan yang diuji produk post market
14. Jumlah alat kesehatan yang dilakukan kalibrasi
15. Persentase sarana distribusi alat kesehatan non-PIE yang diinspeksi paska sertifikasi CDAKB.
16. Jumlah metode pengujian jenis produk alkes yang dikembangkan BPAFK
17. Nilai kinerja penganggaran BPAFK Jakarta.
18. Persentase realisasi target pendapatan BLU.
19. Persentase Realisasi Anggaran.
20. Persentase rekomendasi hasil audit yang telah tuntas ditindaklanjuti

Laporan kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Jakarta atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun 2024. Di samping merupakan pelaksanaan amanat peraturan perundang-undangan terkait, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah. Laporan Kinerja ini juga sekaligus menjadi bahan evaluasi guna meningkatkan kinerja Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Jakarta di masa yang akan datang.

B. Penjelasan Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2023 tanggal 16 Agustus 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana

Teknis Bidang Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan, BPAFK adalah UPT yang melaksanakan pengamanan alat dan fasilitas kesehatan yang dipimpin oleh pejabat administrator.

Tugas dan Fungsi UPT bidang PAFK mempunyai tugas melaksanakan pengamanan alat fasilitas kesehatan, selain itu tugas UPT PAFK juga mendukung pelaksanaan tugas dari unit organisasi jabatan pimpinan tinggi madya yang berkesesuaian dilingkungan Kementerian Kesehatan setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal.

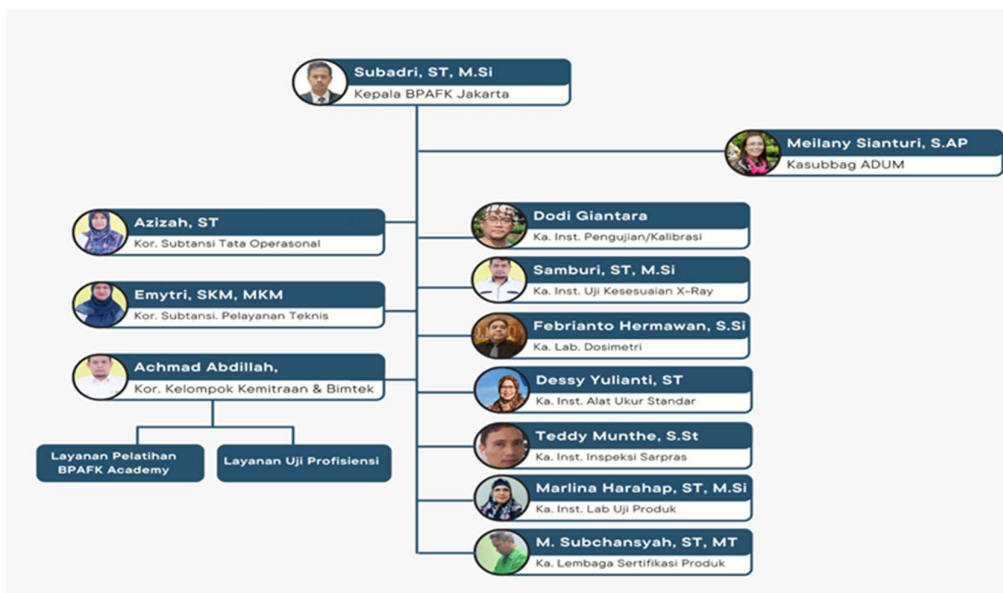
Tugas Pokok Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Jakarta adalah melaksanakan pengamanan fasilitas kesehatan meliputi sarana, prasarana dan peralatan kesehatan melalui pengujian, kalibrasi dan proteksi radiasi dilingkungan pemerintah maupun swasta. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
2. Pelaksanaan uji produk alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
3. Pengujian dan/atau kalibrasi alat kesehatan;
4. Kalibrasi alat ukur standar;
5. Pengujian produk perbekalan kesehatan rumah tangga;
6. Pengamanan radiasi dan pengukuran luaran radiasi;
7. Inspeksi sarana produksi, sarana distribusi, dan sarana pengujian alat kesehatan;
8. Inspeksi sarana produksi dan sarana distribusi perbekalan kesehatan rumah tangga;
9. Inspeksi sarana dan prasarana fasilitas kesehatan;
10. Pengendalian mutu layanan pengujian alat dan fasilitas kesehatan;
11. Pelaksanaan kerjasama Pelaksanaan Bimbingan teknis;
12. Pengelolaan data dan informasi;
13. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
14. Pelaksanaan urusan administrasi BPAFK

Susunan organisasi Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Jakarta tersebut terdiri atas :

1. Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan dan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara, urusan sumber daya manusia, organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat, pengelolaan data dan informasi, pemantauan, evaluasi, laporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan BPAFK;
2. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Bidang PAFK sesuai dengan keahlian dan keterampilan. Kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi. Pemberian penugasan kepada kelompok jabatan fungsional diatur oleh Kepala UPT Bidang PAFK sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja serta permasalahan yang dihadapi.

Adapun struktur organisasi Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Jakarta adalah sebagai berikut :



C. Aspek Strategis Organisasi serta Permasalahan Utama (Strategic Issued) yang dihadapi organisasi

1. Aspek strategis organisasi pada Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Jakarta antara lain :
 - a. Memberikan pelayanan kalibrasi alat ukur standar atau kalibrator alat kesehatan yang ada di Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan, Institusi Penguji Fasilitas Kesehatan milik pemerintah ataupun swasta, laboratorium internal di Rumah Sakit dan Produsen/Distributor alat kesehatan. Saat ini, BPAFK Jakarta menjadi satu-satunya Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan yang mampu memberikan layanan kalibrasi alat ukur Defibrillator Analyzer. Tahun ini, BPAFK Jakarta menyiapkan layanan kalibrasi alat ukur Ventilator Tester, Lux Meter, Alat Ukur Radiasi untuk dapat memberikan layanan mulai tahun 2025. Perluasan rentang ukur untuk besaran dasar temperatur, tekanan dan kelistrikan juga telah disiapkan di tahun 2025 untuk meluaskan jangkauan peralatan ukur dengan keluaran parameter tersebut.
 - b. Membina balai pengujian fasilitas kesehatan dan Institusi Penguji swasta, laboratorium kalibrasi internal rumah sakit dan laboratorium kalibrasi di dinas propinsi dan kabupaten kota di wilayah binaan yang sudah ditetapkan pemerintah. Kegiatan yang dilakukan tahun 2024 antara lain:
 - ❖ Program kemitraan pengujian dan kalibrasi dengan produsen/distributor alkes, rumah sakit vertical dan rumah sakit daerah.
 - ❖ Layanan pelatihan terakreditasi dibidang manajemen teknologi Kesehatan.
 - ❖ Layanan webinar internasional Bersama ECRI Asia Pasific.
 - ❖ Tahun 2024, BPAFK Jakarta diminta untuk memberikan layanan pelatihan dari negara Timor Leste. Ini dapat menjadi isu strategis bahwa kompetensi BPAFK Jakarta dipercaya oleh negara lain.
 - c. Memberikan pelayanan pengamanan fasilitas kesehatan melalui pengujian/kalibrasi, inspeksi dan proteksi radiasi sesuai dengan standar dan menjangkau seluruh fasyankes di Indonesia. Tahun 2024

mampu melayani permintaan pengujian produk baru alat kesehatan dengan keluaran radiasi pengion sesuai dengan persyaratan standar produk.

- d. Memberikan pelayanan pengamanan fasilitas kesehatan melalui uji produk alat kesehatan. Pemenuhan parameter ukur uji produk sesuai dengan standar produk internasional sudah dilakukan dengan adanya pengujian parameter EMC pada seluruh alat kesehatan elektromedik dan in vitro diagnostik.
- e. Mewujudkan tata kelola institusi yang bersih, modern dan bertanggungjawab.

2. Isu Strategis yang sedang dihadapi organisasi adalah :

- a. Meningkatkan ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan.
- b. Menjadi rujukan nasional dalam pengujian kalibrasi peralatan kesehatan ditengah beragamnya standar acuan dalam pengujian kalibrasi alat kesehatan. Apalagi jumlah institusi penguji swasta terus meningkat.
- c. Mengembangkan layanan kalibrasi alat ukur standar bertaraf internasional terutama di kawasan Asia Tenggara.
- d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) BPAFK untuk mampu mengoptimalkan pelayanan pengujian/kalibrasi, proteksi radiasi dan inspeksi diseluruh fasyankes.
- e. Perkembangan teknologi kesehatan yang menuntut Sumber Daya Manusia (SDM) BPAFK untuk terus meningkatkan kompetensinya.
- f. Jumlah fasyankes yang terus meningkat sehingga konsumen yang dilayani juga meningkat.
- g. Meningkatnya jumlah alat kesehatan setiap tahun akan meningkatkan juga permintaan pelayanan kalibrasi.
- h. Memenuhi kebutuhan peralatan dan standar acuan untuk uji dan kalibrasi.
- i. Memenuhi permintaan uji produk alat kesehatan produksi dalam negeri.

- j. Perencanaan perubahan sistem pengelolaan keuangan dari Non BLU menjadi sistem pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU).

D. Sistematis

Laporan Kinerja Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Jakarta tahun 2024 ini menjelaskan pencapaian kinerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta selama tahun 2024, capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan rencana kinerja (penetapan kinerja) yang ditetapkan pada awal tahun 2024 sebagai tolak ukur keberhasilan satu tahun.

Dari analisis atas capaian kinerja diharapkan dapat diidentifikasi berbagai informasi untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

Dengan demikian Sistematis penyajian Laporan Kinerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta Tahun 2024 disusun sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issud*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan menguraikan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (Jika ada);
5. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta capaian langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja

Perencanaan Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam sasaran strategis.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan 237 Tahun 2024 tanggal 30 Mei 2024 BPAFK Jakarta ditetapkan menjadi Satker Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPKBLU), kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam sasaran strategis BPAFK mengalami perubahan untuk indikator kinerja jika dibandingkan dengan tahun 2023, Indikator kinerja utama pada tahun 2024 ada 20 indikator kinerja utama.

Dalam rencana kinerja Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Jakarta tahun 2024, sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Bisnis BPAFK Jakarta dan target masing-masing indikator untuk mencapai sasaran strategis organisasi.

Untuk mendukung Indikator Kinerja Utama Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Jakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Visi dan Misi, adapun Visi dan Misi Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Jakarta adalah sebagai berikut :

Visi :

“Menjadi Pusat Layanan Pengamanan Fasilitas Kesehatan di Indonesia”

Misi :

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, ditetapkan misi BPAFK Jakarta yang menggambarkan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi BPAFK Jakarta. Adapun misi BPAFK Jakarta yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan pengamanan fasilitas kesehatan melalui pengujian, kalibrasi dan inspeksi yang akurat, terpercaya, komprehensif dengan teknologi terkini;
2. Memberikan bimbingan teknis dan peningkatan kompetensi personel di bidang pelayanan pengamanan fasilitas kesehatan;

3. Mewujudkan tata kelola balai yang transparan dan akuntabel.

Dalam mewujudkan Visi dan Misi Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Jakarta melaksanakan perencanaan kinerja melalui proses penetapan kinerja dalam satu tahun anggaran 2024, sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan target masing-masing indikator untuk mencapai sasaran strategis organisasi.

Setelah BPAFK menjadi satker PPKBLU sasaran strategis dan program indikator kinerja utama terdapat perubahan sehingga ada beberapa indikator kinerja utama yang berbeda untuk kurun waktu 5 tahun 2024-2028 yang sebagai berikut :

SASARAN ,INDIKATOR KINERJA DAN TARGET BPFK JAKARTA TAHUN 2024-2028

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	PIC	Satuan	Target					
					2024	2025	2026	2027	2028	
1	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN									
	Terwujudnya peningkatan kepuasan stakeholder	KPI. 1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Tata Operasioanl	Juml ah	82	84	85	86	87
	Terwujudnya pengelolaan keuangan yang sehat dan akuntabel	KPI. 2	Perolehan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)	Admi nistras i Umum	Juml ah	29.311.918.800	35.906.908.500	41.856.009.381	47.436.810.632	57.780.862.250
	Peningkatan cakupan jenis pelayanan sarana, prasarana, dan alat SPA	KPI. 3	Penambahan ruang lingkup pelayanan yang terakreditasi	Tata Operasioanl	Juml ah	16	10	10	10	10
		KPI. 4	Penambahan ruang lingkup pelayanan	Tata Operasioanl	Juml ah	23	10	10	10	10
	Peningkatan ketercapaian standar pelayanan minimum	KPI. 5	Persentase ketepatan waktu penerbitan sertifikat/LHU sesuai SPM	Pelaya nan Teknis	Pros enta se	75%	77%	80%	82%	85%
	Meningkatnya kualitas sarana, prasarana, dan alat (SPA) fasilitas pelayanan kesehatan rujukan	KPI. 6	Persentase peralatan yang telah dikalibrasi	Tata Operasioanl	Pros enta se	65%	67%	70%	73%	76%
	Terwujudnya pemenuhan SDM yang kompeten	KPI. 7	Persentase SDM ASN yang telah mengikuti pelatihan	Bimbi ngan Teknis	Pros enta se	95%	96%	97%	98%	99%

	Terselenggaranya pelayanan Center of Excellence di BPFK secara optimal	KPI. 8	Terselenggaranya Layanan Unggulan bertaraf Internasional	Bimbingan Teknis	Jumlah	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
		KPI. 9	Persentase ketepatan waktu pelayanan	Pelayanan Teknis	Prosentase	80%	82%	84%	86%	88%
		KPI. 10	Terselenggaranya integrasi sistem informasi layanan berbasis digital	Administrasi Umum	Jumlah	1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem
	Mempunyai tata kelola keuangan melalui badan layanan umum	KPI. 11	Kenaikan nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Administrasi Umum	Nilai	5 Poin	5 Poin	5 Poin	5 Poin	5 Poin
	Meningkatnya pengawasan sarana dan produk alat kesehatan dan PKRT	KPI. 12	Jumlah prototipe produk alkes yang diuji BPAFK	Pelayanan Teknis	Jumlah	550	570	600	630	650
		KPI. 13	Jumlah alat kesehatan yang diuji produk post market	Pelayanan Teknis	Jumlah	50	55	60	65	70
		KPI. 14	Jumlah alat kesehatan yang dilakukan kalibrasi	Pelayanan Teknis	Jumlah	45000	47000	49000	50000	51000
		KPI. 15	Persentase sarana distribusi alat kesehatan non-PIE yang diinspeksi paska sertifikasi CDAKB	Pelayanan Teknis	Prosentase	30%	32%	34%	36%	38%
		KPI. 16	Jumlah metode pengujian jenis produk alkes yang dikembangkan BPAFK	Tata Operasional	Jumlah	70	72	74	76	78
2	Program Dukungan Manajemen									
	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	KPI. 17	Nilai kinerja penganggaran BPAFK Jakarta	Administrasi Umum	Nilai	80.1	95	95	95	95
		KPI. 18	Persentase realisasi target pendapatan BLU	Administrasi Umum	Prosentase	95%	95%	96%	96%	97%
		KPI. 19	Persentase Realisasi Anggaran	Administrasi	Prosentase	96%	96%	96%	97%	97%

			Umum						
	KPI. 20	Persentase rekomendasi hasil audit yang telah tuntas ditindaklanjuti	Administrasi Umum	Prosentase	95%	95%	95%	96%	96%

B. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014, Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Jakarta menyusun perjanjian kinerja tahun 2024 mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2024-2028. Target kinerja ini menjadi komitmen Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Jakarta untuk mencapainya pada tahun 2024.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
				2024
1	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN			
	Kegiatan : Peningkatan Pengawasan Alat Kesehatan (Alkes) dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)			
	Terwujudnya peningkatan kepuasan stakeholder	KPI. 1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82
	Terwujudnya pengelolaan keuangan yang sehat dan akuntabel	KPI. 2	Perolehan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)	29.311.918.800
	Peningkatan cakupan jenis pelayanan sarana, prasarana, dan alat SPA	KPI. 3	Penambahan ruang lingkup pelayanan yang terakreditasi	16
		KPI. 4	Penambahan ruang lingkup pelayanan	23
	Peningkatan ketercapaian standar pelayanan minimum	KPI. 5	Persentase ketepatan waktu penerbitan sertifikat/LHU sesuai SPM	75%

	Meningkatnya kualitas sarana, prasarana, dan alat (SPA) fasilitas pelayanan kesehatan rujukan	KPI. 6	Persentase peralatan yang telah dikalibrasi	65%
	Terwujudnya pemenuhan SDM yang kompeten	KPI. 7	Persentase SDM ASN yang telah mengikuti pelatihan	95%
	Terselenggaranya pelayanan Center of Excellence di BPFK secara optimal	KPI. 8	Terselenggaranya Layanan Unggulan bertaraf Internasional	1 Layanan
		KPI. 9	Persentase ketepatan waktu pelayanan	80%
		KPI.10	Terselenggaranya integrasi sistem informasi layanan berbasis digital	1 Sistem
	Mempunyai tata kelola keuangan melalui badan layanan umum	KPI.11	Kenaikan nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	5 Poin
	Meningkatnya pengawasan sarana dan produk alat kesehatan dan PKRT	KPI.12	Jumlah prototipe produk alkes yang diuji BPAFK	550
		KPI.13	Jumlah alat kesehatan yang diuji produk post market	50
		KPI.14	Jumlah alat kesehatan yang dilakukan kalibrasi	45000
		KPI.15	Persentase sarana distribusi alat kesehatan non-PIE yang diinspeksi paska sertifikasi CDAKB	30%
		KPI.16	Jumlah metode pengujian jenis produk alkes yang dikembangkan BPAFK	70
2	Program Dukungan Manajemen			
	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	KPI.17	Nilai kinerja penganggaran BPAFK Jakarta	80,1
		KPI.18	Persentase realisasi target pendapatan BLU	95%
		KPI.19	Persentase Realisasi Anggaran	96%
		KPI.20	Persentase rekomendasi hasil audit yang telah tuntas ditindaklanjuti	95%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada Sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

KPI.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Kepuasan pelanggan adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan pelanggan yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat pelanggan dalam memperoleh pelayanan dari BPAFK Jakarta. Target yang ditetapkan adalah 82.

Tabel KPI.1
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indikator Kinerja		PIC	Target	Realisasi	Capaian
			2024	2024	
KPI. 1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Tata Operasioanl	82	89,25	108,84%

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini :
Target indikator kinerja Indeks Kepuasan pelanggan 82 dan realisasi 89,25 atau 108,84% maka dinyatakan bahwa kinerja sasaran berdasarkan indikator adalah **Sangat Memuaskan**.
2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja		PIC	Target			Realisasi			Capaian		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
KPI. 1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Tata Operasioan	80	81	89,25	80,34	82,01	89,25	100,43%	101%	108,84%

Realisasi kinerja indeks kepuasan pelanggan Tahun 2024 sebesar 89,25%, Tahun 2023 sebesar 82,01% dan Tahun 2022 sebesar 80,34%.



Gambar 1 Indeks Kepuasan Pelanggan

Realisasi indeks kepuasan pelanggan pada tahun 2022 sebesar 80,34% dan realisasi tahun 2023 sebesar 82,01% , sehingga terjadi pencapaian masing-masing sebesar 100,43% dan 101%.

3. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional Berdasarkan Nilai Interval Konversi IKM pada Permen PAN RB No 14 tahun 2017 tentang indeks kepuasan masyarakat (pelanggan eksternal) yang bisa dibandingkan yaitu 88,31 – 100,00 mendapat nilai mutu pelayanan A.
4. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan.
Analisa capaian kinerja untuk indeks kepuasan pelanggan internal dan eksternal yaitu;

Kepuasan pelanggan adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan pelanggan yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat pelanggan dalam memperoleh pelayanan dari BPAFK Jakarta. Nilai Rata-rata Unsur dari Unsur Pelayanan menunjukkan gambaran hasil penilaian seluruh indikator dalam survey ini.

Penilaian kepuasan pelanggan terdiri dari sembilan indikator yaitu; unsur persyaratan, unsur sistem mekanisme prosedur, unsur waktu penyelesaian, unsur biaya/tarif, unsur produk spesifikasi jenis pelayanan, unsur kompetensi pelaksana, unsur perilaku pelaksana, unsur penanganan pengaduan saran masukan dan unsur sarana prasarana. Dari sembilan unsur tersebut mendapatkan nilai indeks kepuasan pelanggan yang merata, sementara indikator yang menurut responden paling tidak baik kondisinya adalah unsur biaya/tarif karena adanya pemberlakuan pola tarif yang baru di BPAFK Jakarta.

Secara umum keseluruhan indikator sudah mencapai nilai baik. Terdapat nilai terendah pada pengukuran kinerja waktu penyelesaian, dengan adanya permintaan Responden untuk meningkatkan waktu penyelesaian laporan. Standar Pelayanan Minimum BPAFK Jakarta untuk waktu penyelesaian selama 30 hari kerja, namun belum semua terpenuhi dikarenakan karena penggunaan aplikasi yang belum maksimal.

Alternatif Solusi :

Rencana tindak Lanjut SKM antara lain:

- a. Optimalisasi penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Kalibrasi BPAFK Jakarta (SIPEKA) dan Sistem Informasi Manajemen Pelayanan BPAFK Jakarta (SIMPEL).
 - b. Evaluasi Standar Pelayanan Minimal BPAFK Jakarta
 - c. Pelaksanaan sistem reward & punishment bagi pegawai BPAFK Jakarta terhadap kinerja layanan
 - d. Humas untuk menangani pengaduan pelanggan.
5. Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- Survey pengambilan data secara langsung atau menggunakan media elektronik dan analisa dilakukan oleh staf seksi Tata Operasional
- a. Penggunaan anggaran sesuai Standar Biaya Umum

- b. Alokasi anggaran dalam DIPA sebesar Rp196.055.000,- dan realisasi sebesar Rp179.216.360 atau 91,41%.
6. Analisa Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja
Kepuasan pelanggan BPAFK Jakarta perlu ditunjang oleh penambahan petugas dan alat untuk pemenuhan layanan pengujian/kalibrasi, integrasi pelaporan dan monitoring evaluasi pelayanan serta peningkatan aplikasi SIPEKA.

KPI. 2 Perolehan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)

Merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat, termasuk pendapatan yang berasal dari hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan lain-lain pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan yang berasal dari Rupiah Murni.

Target yang ditetapkan pada tahun 2024 adalah 29,3 Milyar.

Tabel KPI. 2

Perolehan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)

Indikator Kinerja		PIC	Target	Realisasi	Capaian
			2024	2024	
KPI. 2	Perolehan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)	Administrasi Umum	29.311.918.800	32.138.299.747	109,64

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini
Target kinerja yang ditetapkan pada tahun ini sebesar Rp29.311.918.800 dan realisasi kinerja sebesar Rp32.138.299.747,- atau (109,64)%, maka dapat dinyatakan bahwa capaian kinerja pada indikator kinerja **Sangat Memuaskan**.
2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja		PIC	Target			Realisasi			Capaian		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
KPI. 2	Perolehan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)	Administrasi Umum	0	17.387.500.000	29.311.918.800	0	25.489.452.062	32.138.299.747	-	147%	109,64%



3. Realisasi kinerja perolehan pendapatan Badan Layanan Umum pada Tahun 2024 sebesar Rp32.138.299.747,- atau 109,64%, Tahun 2023 sebesar Rp25.489.452.062,- atau 147%, sedangkan capaian Tahun 2022 tidak dapat disandingkan karena satker merupakan satker PNBPN.
4. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.
Jika dibandingkan realisasi kinerja tahun 2024 sebesar Rp32.138.299.747,- dengan target jangka menengah sebesar Rp35.906.909.000,- terdapat peningkatan sebesar 89%.
5. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional (Jika Ada)
Tidak ada Acuan atau pun Standar Nasional yang bisa dibandingkan.

6. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Analisa penyebab kegagalan kinerja yaitu:

- a. Tim BPAFK Jakarta sudah melakukan penagihan tetapi pihak Rumah Sakit/Costumer belum bayar. Dikarenakan penagihan masih menunggu kelengkapan dokumen baik dari internal maupun eksternal.
- b. Alokasi dana untuk pembayaran biaya pengujian kalibrasi alat kesehatan terutama di Rumah Sakit pemerintah belum tersedia karena belum terpenuhinya penerimaan BLU di rumah sakit tersebut.
- c. Birokrasi penyelesaian tagihan di intitusi pelanggan cukup memakan waktu yang lama menyebabkan pencairan tagihan membutuhkan waktu berbulan-bulan.
- d. Kendala lokasi pelanggan yang jauh dan perlu didatangi membutuhkan biaya anggaran perjadi namun terbentur dengan anggaran yang terbatas
- e. Kendala internal BPAFK Jakarta pada proses penagihan dikarenakan perubahan data terkait jumlah alat yang dilakukan pengujian/kalibrasi.

7. Analisa atas efisiensi penggunaan Sumber Daya

Alokasi dana untuk menunjang kegiatan ini sebesar Rp23.667.682.000,- realisasi sebesar Rp22.859.514.720,- atau 96,59%. Capaian ini dikarenakan adanya efisiensi biaya penginapan di Lokasi Bodetabek

8. Analisa Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Tim penagihan dan unit kerja terkait serta faskes milik pemerintah harus melakukan koordinasi yang lebih baik lagi.

KPI.3 Penambahan ruang lingkup pelayanan yang terakreditasi

Jumlah ruang lingkup pelayanan SPA yang terakreditasi adalah jenis pelayanan pengujian/kalibrasi alat kesehatan dan alat ukur serta inspeksi sarana prasarana yang terakreditasi sesuai persyaratan yang diberikan oleh lembaga atau instansi yang berwenang seperti Komite Akreditasi Nasional dan Direktorat Mutu Tenaga Kesehatan Kemenkes RI. Target yang ditetapkan untuk tahun 2024 adalah 16 lingkup.

Tabel KPI.3

Penambahan ruang lingkup pelayanan yang terakreditasi

Indikator Kinerja		PIC	Target	Realisasi	Capaian
			2024	2024	
KPI. 3	Penambahan ruang lingkup pelayanan yang terakreditasi	Tata Operasioanl	16	16	100%

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini
Target indikator kinerja yang ditetapkan 16 ruang lingkup pelayanan yang erakreditasi dan realisasi kinerja tahun ini sebesar 16 ruang lingkup pelayanan yang terakreditasi, maka dinyatakan bahwa kinerja sasaran berdasarkan indikator ini **Memuaskan**.
2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja		PIC	Target			Realisasi			Capaian		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
KPI. 3	Penambahan ruang lingkup pelayanan yang terakreditasi	Tata Operasioal	80	97	16/114	95	98	16/114	119%	101%	100%



Grafik Perbandingan Penambahan Ruang lingkup Layanan Terakreditasi
Total realisasi penambahan ruang lingkup pelayanan tahun 2024 adalah 16.
Terdapat revisi definisi operasional terkait penambahan lingkup layanan

terakreditasi pada tahun 2022 yang sebelumnya adalah akumulasi layanan yang terakreditasi yaitu target 80 lingkup dan realisasi 97 lingkup, tahun 2023 menjadi 98 lingkup. Capaian penambahan ruang lingkup terakreditasi 114 lingkup. Capaian tahun 2024 sebesar 100% memenuhi target. Sehingga perbandingan antara target dan capaian Tahun 2022, 2023 dan 2024 dapat dinyatakan tercapai.

3. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional (Jika Ada)

Tidak ada Acuan atau pun Standar Nasional yang bisa dibandingkan

4. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

Analisa penyebab keberhasilan capaian kinerja yaitu :

Jadwal survailen/akreditasi yang bersamaan pada tahun 2023 ada 4 sistem mutu SNI 17025:2017; SNI 17043:2010; SNI 17021:2012; SNI 17065:2012 melibatkan Lab Kalibrasi Alat Kesehatan, Lab Kalibrasi Alat Ukur Standar, Penyelenggara Uji Profisiensi, Lab Inspeksi Sarana dan Prasarana dan Lembaga Sertifikasi Produk yang ditunjang oleh kesiapan seluruh personil Laboratorium dengan personil Tata Operasional dalam menghadapi Survailen/Akreditasi sehingga target kinerja tercapai.

5. Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
 - a. Pelaksanaan kegiatan harus berazaskan kepada kewajaran, transparansi, dan efisiensi serta pembiayaan mengacu pada standar biaya umum (SBU)
 - b. Alokasi anggaran dalam DIPA sebesar Rp919.030.000 dan realisasi sebesar Rp 852.268.131 atau 92,74%.
6. Analisa Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja
Kebutuhan untuk Jaminan pelayanan sesuai dengan Permenkes no 54 tahun 2015 dan Standar Nasional Indonesia serta kepercayaan pelanggan pada Lembaga yang terakreditasi.
7. Analisa Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kebutuhan untuk Jaminan pelayanan sesuai dengan Permenkes no 54 tahun 2015 dan Standar Nasional Indonesia serta kepercayaan pelanggan pada Lembaga yang terakreditasi

KPI. 4 Penambahan ruang lingkup pelayanan

Jumlah ruang lingkup pelayanan adalah jenis pelayanan pengujian/kalibrasi alat kesehatan dan kalibrasi alat ukur serta inspeksi sarana prasarana dan Sertifikasi Alat kesehatan serta pelatihan. Target yang ditetapkan untuk menambah jumlah ruang lingkup pelayanan sebesar 23 lingkup pelayanan.

Tabel KPI.4

Penambahan ruang lingkup pelayanan yang terakreditasi

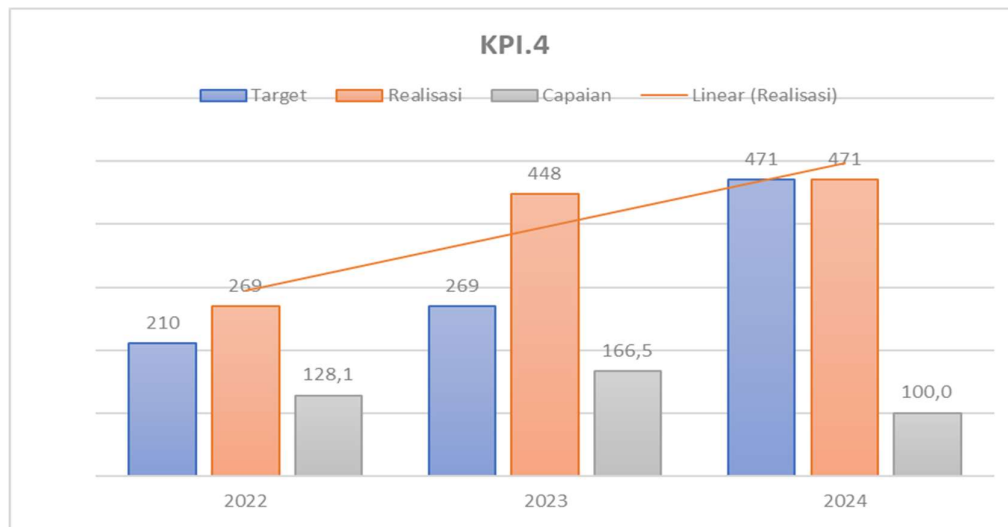
Indikator Kinerja		PIC	Target	Realisasi	Capaian
			2024	2024	
KPI. 4	Penambahan ruang lingkup pelayanan	Tata Operasioal	23	23	100%

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini
Target indikator kinerja yang ditetapkan pada tahun 2024 sebesar 23 dan realisasi kinerja sebesar 23 atau (100%) maka dinyatakan bahwa kinerja sasaran berdasarkan indikator itu **Memuaskan**.
2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja		PIC	Target			Realisasi			Capaian		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
KPI. 4	Penambahan ruang lingkup pelayanan	Tata Operasioal	210	269	23 (471)	269	448	23 (471)	127,62%	166,54%	100,00%

Capaian indikator kinerja di tahun 2024 sebesar 100%, tahun 2023 sebesar 166,54%, penambahan jumlah layanan tahun 2023 lebih sedikit dibandingkan tahun 2024. Perbedaan definisi Operasional (DO) tahun 2023 dan 2024 terkait dengan akumulasi dan jumlah pelayanan. Pada tahun 2024 petugas sudah

menginput pelaporan melalui aplikasi SIPEKA dan penerbitan sertifikat sudah dilakukan secara elektronik melalui aplikasi SIMPEL (Sistem Pelayanan).



3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi
4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional (Jika Ada)
Tidak ada Acuan ataupun Standar Nasional yang bisa dibandingkan, hanya menganalisa data penerbitan sertifikat sesuai standar pelayanan minimal BPFK Jakarta.
5. Analisa Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan
 - a. Analisa penyebab keberhasilan kinerja
 1. Penambahan sumber daya manusia dan kapasitasnya
 2. Pembuatan aplikasi SIPEKA untuk evaluasi laporan kalibrasi alkes yang terintegrasi dengan aplikasi SIMPEL untuk penerbitan sertifikat
 3. Meningkatnya permintaan pelayanan uji produk alat kesehatan produksi dalam negeri.
 4. Meningkatnya jumlah kemampuan pelayanan pengujian dan kalibrasi serta inspeksi.
 5. Peningkatan mutu layanan dan lingkup akreditasi BPAFK

6. Terlaksananya perjanjian Kerjasama (MoU) pelayanan dengan beberapa RS Vertikal, RS Pemerintah Daerah dan RS Swasta.

7. Adanya program supervisi atau pemantauan pelaksanaan dan *feedback* terhadap pelayanan BPAFK Jakarta

Analisa penyebab kendala

1. Belum optimalnya penggunaan aplikasi SIMPEL, dikarenakan belum tersedianya beberapa menu penunjang untuk monitoring bagi petugas kalibrasi alkes.

2. Gangguan jaringan internet saat input laporan kalibrasi difasyankes

6. Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- Alokasi anggaran dalam DIPA sebesar Rp443.240.000 dan realisasi sebesar Rp430.857.761 atau 97,21%.

- Pelaksanaan kegiatan harus ber-azaskan kepada kewajaran, transparansi, dan efisiensi serta pembiayaan mengacu pada standar biaya umum (SBU)

7 Analisa Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Masih ada Instalasi laboratorium AUS , PRUK, Dosimetri, Uji Produk dan Sarana Prasarana yang membuat Laporan Hasil pada SIMPEL masih dilakukan secara manual (dengan mengupload exel dan pdf) sehingga masih memungkinkan terjadinya beberapa kesalahan Laporan Hasil yang diterbitkan secara elektronik sehingga diperlukan pengembangan aplikasi pembuatan laporan hasil Pengujian/Kalibrasi bagi Instalasi tersebut

KPI.5 Persentase ketepatan waktu penerbitan sertifikat/LHU sesuai SPM

Persentase sertifikat dan atau laporan yang terbit sesuai waktu standar (tidak lebih dari 14 hari) setelah pelaksanaan pengujian, kalibrasi dan inspeksi dilaksanakan. Target yang ditetapkan pada tahun 2024 sebesar 75%.

Tabel KPI.5

Persentase ketepatan waktu penerbitan sertifikat/LHU sesuai SPM

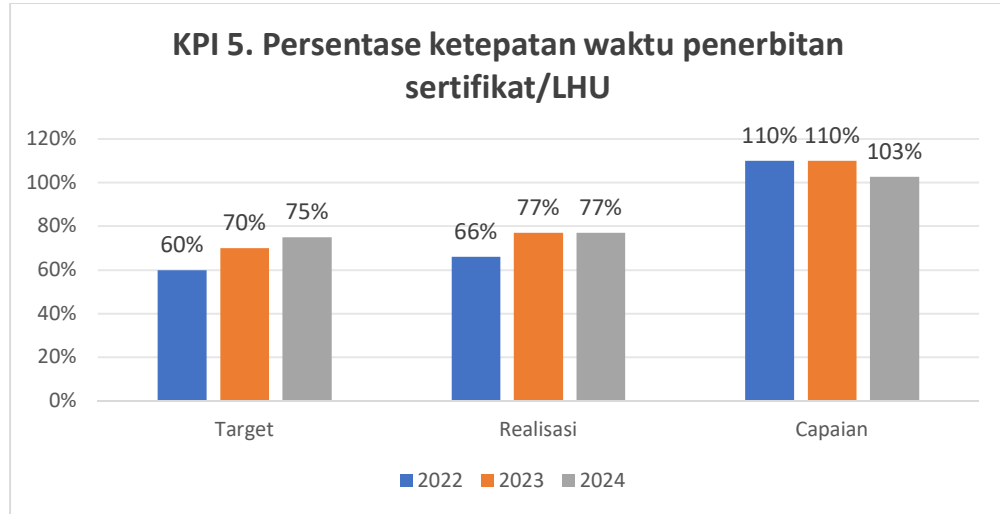
Indikator Kinerja		PIC	Target	Realisasi	Capaian
			2024	Smt 1 2024	
KPI. 5	Persentase ketepatan waktu penerbitan sertifikat/LHU sesuai SPM	Pelayanan Teknis	75%	77%	102,67%

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini
Target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2024 sebesar 75% dengan realisasi 2024 ini sebesar 77 % atau 102,67%, maka dapat dinyatakan bahwa kinerja sasaran berdasarkan indikator **Sangat Memuaskan.**
2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja		PIC	Target			Realisasi			Capaian		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
KPI. 5	Persentase ketepatan waktu penerbitan sertifikat/LHU sesuai SPM	Pelayanan Teknis	60%	70%	75%	66%	77%	77%	110%	110%	102,67%

Realisasi kinerja Tahun 2024 sebesar 77%, Tahun 2023 sebesar 77% dan Tahun 2022 sebesar 66% sedangkan capaian kinerja Tahun 2024 sebesar 102,67 %, Tahun 2023 sebesar 110% dan Tahun 2022 sebesar 110%.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi
4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional (Jika Ada)
Tidak ada Acuan atau pun Standar Nasional yang bisa dibandingkan.



Gambar Persentase ketepatan waktu penerbitan sertifikat/LHU sesuai SPM

5. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

a. Analisa penyebab keberhasilan kinerja

1. Mencapai Rata-rata 77 % Ketepatan waktu penerbitan Sertifikat/Laporan dari layanan Inst/Lab Kalibrasi alkes 75%, Pengujian Proteksi Radiasi dan Kesesuai Pesawat sinar X 74%, Kalibrasi Alat Ukur Standar 91%, Uji Produk 89%, Uji Profiensi 77% dan Lab Dosimetri 76% serta instalasi inpeksi 54%
2. Ada penambahan sumber daya manusia dan kapasitasnya serta kalibrator / alat ukur standar yang dimiliki BPAFK Jakarta.
3. Pengembangan aplikasi SIPEKA untuk analisa dan evaluasi laporan petugas Kalibrasi/pengujian yang terintegrasi dengan aplikasi system informasi manajemen pelayanan (SIMPEL)
4. Terintegrasinya SIPATEN sistem monitoring laporan oleh pelanggan dan stakeholder lainnya antara lain ASPAK dan Bapeten
5. Meningkatnya mutu layanan dan koordinasi antar unit kerja dan instalasi/laboratorium BPAFK Jakarta
7. Terlaksananya kegiatan survey, koordinasi, monitoring dan evaluasi kerjasama /MOU dan pelayanan BPFK Jakarta.

b. Analisa penyebab kendala

1. Belum maksimalnya pengembangan aplikasi SIMPEL, dikarenakan belum lengkapnya beberapa menu penunjang untuk monitoring dan evaluasi
2. Terjadi laporan yang hilang/eror karena terbatasnya alat pengolah data / laptop yang dimiliki petugas
3. Gangguan jaringan internet saat input laporan ketika kalibrasi difasyankes.

6. Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Alokasi anggaran tersedia sebesar Rp219.616.000,- dengan realisasi sebesar Rp215.117.000,- atau 97,95%, dan dengan adanya integrasi aplikasi SIPEKA petugas penguji alkes dapat input langsung bersamaan kalibrasi di fasyankes dengan SIMPEL maka substansi Pelayanan Teknis dapat melakukan koordinasi pelayanan dan melakukan verifikasi dan validasi penerbitan sertifikat .

7. Analisa Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Masih ada Instalasi laboratorium AUS , PRUK, Dosimetri, Uji Produk dan Sarana Prasarana yang membuat Laporan Hasil pada SIMPEL dilakukan secara manual (dengan mengupload excel dan pdf) sehingga masih memungkinkan terjadinya beberapa kesalahan Laporan yang diterbitkan secara elektronik sehingga diperlukan pengembangan aplikasi pembuatan laporan hasil Pengujian/Kalibrasi bagi Instalasi tersebut.

KPI.6 Persentase peralatan yang telah dikalibrasi.

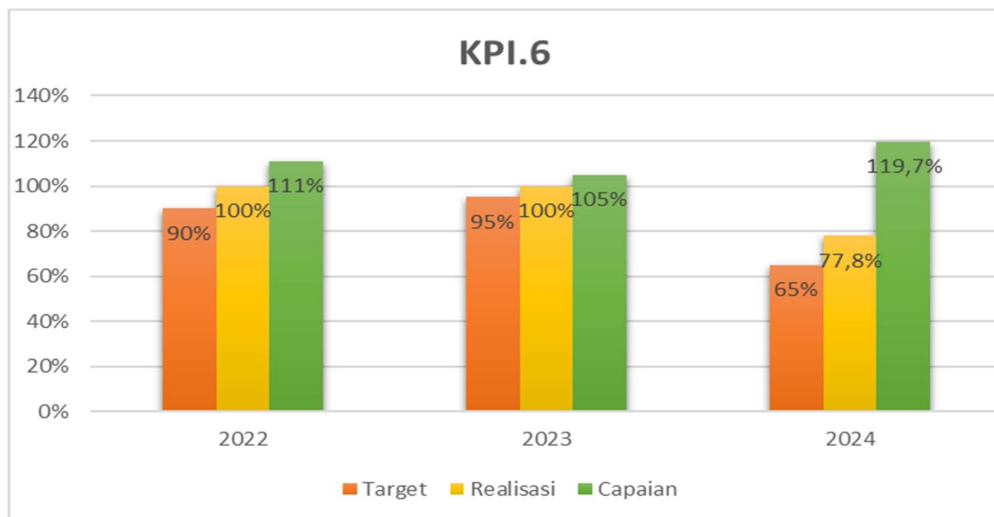
Persentase alat ukur yang dikalibrasi terhadap jumlah alat ukur standar yang dimiliki BPAFK Jakarta. Target yang ditetapkan pada tahun 2024 sebesar 65%

Tabel KPI.6
 Persentase peralatan yang telah dikalibrasi

Indikator Kinerja		PIC	Target	Realisasi	Capaian
			2024	2024	
KPI. 6	Persentase peralatan yang telah dikalibrasi	Tata Operasioanl	65%	77,8%	119,69%

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini
 Target indikator kinerja tahun ini sebesar 65% dan realisasi kinerja tahun ini sebesar 77,8% atau 119,69%, maka dinyatakan bahwa capaian berdasarkan indicator ini **Sangat Memuaskan**.
2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja		PIC	Target			Realisasi			Capaian		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
KPI. 6	Persentase peralatan yang telah dikalibrasi	Tata Operasioanl	90%	95%	65%	100%	100%	77,8%	111%	105%	119,69%



Gambar Persentase peralatan yang telah dikalibrasi

Jika realisasi indikator ini dibandingkan dengan capaian kinerja maka terlihat realisasi tahun 2024 119,69%, 2023 sebesar 105% dan tahun 2022

sebesar 111%. Adapun capaian tahun 2024 sebesar 119% dan capaian 2023 sebesar 105%. Hal tersebut terjadi karena bertambahnya jumlah kemampuan kalibrasi ala ukur standar di BPAFK Jakarta sehingga BPAFK Jakarta dapat melakukan kalibrasi ala ukur standar secara mandiri dengan waktu yang lebih fleksibel. Kendala terjadi karena :

- Padatnya pelayanan dan kegiatan Laboratorium dan unit kerja untuk mengikuti program pelatihan dan uji kompetensi
- Kurangnya monitoring dari unit kerja dan kepala instalasi

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan Desember Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi
4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional (Jika Ada)
Tidak ada Acuan atau pun Standar Nasional yang bisa dibandingkan.
5. Analisa atas efisiensi penggunaan Sumber Daya
 - a. Efisiensi biaya recalibrasi alat ukur standar dilakukan di BPAFK Jakarta.
 - b. Alokasi anggaran dalam DIPA 2024 sebesar Rp806.535.000 terealisasi sebesar Rp769.701.250 atau sebesar 95,43%.
6. Analisa Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja
 - a. Keberhasilan indikator ini ditunjang oleh Program / kegiatan yaitu :
 1. Membangun Jejaring Kemitraan dengan BRIN (BATAN, BSN / Laboratorium SNSU), Instansi Pendidikan, Bapelkes, PT Sucofindo antara lain melalui kerjasama dengan Diklat BSN
 2. Melakukan Koordinasi antara Laboratorium dan unit kerja lainnya dalam merencanakan recalibrasi alat standar.
7. Rencana Tindak lanjut adalah melakukan :
 - a. Meningkatkan jejaring kerja dan kemitraan serta kerjasama dengan BRIN, BAPETEN, SNSU dll
 - b. Menyusun jadwal kalibrasi secara bergantian
 - c. Meningkatkan koordinasi dan kesiapan alat ukur yang akan di kalibrasi

KPI.7 Persentase SDM ASN yang telah mengikuti pelatihan
 Presentase ASN BPAFK Jakarta yang mendapatkan program kompetensi baik pelatihan, coaching, maupun mentoring
 Target yang ditetapkan pada tahun 2024 sebesar 95%.

Tabel KPI.7

Persentase SDM ASN yang telah mengikuti pelatihan

Indikator Kinerja		PIC	Target	Realisasi	Capaian
			2024	2024	
KPI.7	Persentase SDM ASN yang telah mengikuti pelatihan	Bimbingan Teknis	95%	97%	102,11%

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini
 Target indikator kinerja yang ditetapkan pada tahun 2024 sebesar 95% dan realisasi kinerja sebesar 97% atau 102,11%, maka dinyatakan bahwa pencapaian berdasarkan indicator kinerja itu **Sangat Memuaskan**.
2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	PIC	Target			Realisasi			Capaian			
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
KPI.7	Persentase SDM ASN yang telah mengikuti pelatihan	Bimbin gan Teknis	85%	85%	95%	95%	85%	98%	112%	100%	102,11%

Pada indicator ini realisasi kinerja dapat di bandingkan dengan tahun 2022 dan tahun 2023 atau tahun sebelumnya. Adapun realisasi kinerja pada tahun 2024 adalah 98%.

3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Jika dibandingkan realisasi kinerja dengan target jangka menengah capaian tahun ini 2024 jauh meningkat dan mendekati presentase 100%.

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional (Jika Ada)
Belum ada target secara nasional yang ditargetkan oleh regulator dalam hal ini Ditjen Farmalkes.
5. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan;
Analisis penyebab keberhasilan pada indikator ini yaitu :
Telah berdirinya Lembaga pelatihan terakreditasi BPAFK Academy, sehingga lebih mudah dalam penyelenggaraan pelatihan yang diakui dan terakreditasi melalui plataran sehat kemenkes. Perencanaan berbasis training need analysis juga menjadi salah satu strategi pencapaian hingga 98%, TNA berdasarkan kebutuhan Renstra.
6. Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
 - a. Melakukan efisiensi perjalanan dinas dan kegiatan daring/online serta meningkatkan kerjasama antara institusi. Kolaborasi dan koordinasi antara kegiatan Substansi Kemitraan dan Bimbingan Teknis dengan Substansi Tata Operasional serta personel teknis di Instalasi/Laboratorium BPFK Jakarta selama pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis pada institusi pengujian
 - b. Alokasi anggaran sebesar Rp489.134.000,- terealisasi sebesar Rp444.144.203,- atau 90,80%
7. Analisa Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Tahun 2024 BPAFK melakukan program yaitu :
 - a. Kemitraan , jejaring kerja dan promosi serta pameran .
 - b. Kegiatan Pengampuan di Unit Kalibrasi Mandiri 5 RS Vertikal
 - c. kegiatan pelatihan di IPFK Pemerintah dan swasta serta bimtek kalibrasi alat ukur .
 - d. Melakukan Sosialisasi layanan melalui webinar dan radio kemenkes serta medsos BPFK Jakarta.

- e. Menyelenggarakan uji profesiensi terakreditasi 17043
- f. Lembaga pelatihan terkreditasi BPAFK Academy

KPI.8 Terselenggaranya Layanan Unggulan bertaraf Internasional

Terselenggaranya Layanan Unggulan bertaraf Internasional adalah Kerja sama dengan Institusi Luar Negeri di bidang kesehatan atau lainnya terkait peningkatan layanan unggulan Target yang ditetapkan pada tahun 2024 1 layanan

Tabel KPI.8
Terselenggaranya Layanan Unggulan bertaraf Internasional

Indikator Kinerja		PIC	Target	Realisasi	Capaian
			2024	2024	
KPI. 8	Terselenggaranya Layanan Unggulan bertaraf Internasional	Bimbingan Teknis	1 Layanan	1 Layanan	100%

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini
Target indikator kinerja tahun 2024 sebesar 1 kegiatan dan realisasi kinerja tahun 2024 sebesar 1 kegiatan, hal ini disebabkan pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan pada semester ke dua dan telah terlaksana sesuai rencana, maka dinyatakan bahwa capaian berdasarkan indicator ini **memuaskan**.
2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja		PIC	Target			Realisasi			Capaian		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
KPI. 8	Terselenggaranya Layanan Unggulan bertaraf Internasional	Bimbingan Teknis	0	1	1 Layanan	0	1	1	0	1	1

Realisasi indikator ini jika dibandingkan dengan capaian kinerja realisasi tahun 2022 adalah sesuai perencanaan. Adapun capaian tahun 2024 sebesar 100% sesuai target yang telah ditetapkan. Hal tersebut terjadi

karena sejak tahun 2023 mulainya BPFK Jakarta menjalin kerjasama dengan lembaga luar negeri untuk melaksanakan kegiatan bersama.

3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Jika dibandingkan realisasi kinerja dengan target jangka menengah capaian tahun ini 2024 akan lebih meningkat.

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional (Jika Ada)

Belum ada target secara nasional yang ditargetkan oleh regulator dalam hal ini Ditjen Farmalkes.

5. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan;

Analisis penyebab keberhasilan melewati angka 100% pada indikator ini yaitu :

Keberhasilan BPAFK Jakarta memiliki Lembaga pelatihan terakreditasi memiliki engagement yang kuat dalam prospek Kerjasama dengan ECRI Asia Pasifik. Prospek Kerjasama ini berkelanjutan oleh ECRI terutama dalam peningkatan kompetensi SDM.

6. Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- a. keterlibatan unit lain dalam mengadakan webinar internasional yang dituangkan dalam bentuk SK.
- b. Alokasi anggaran sebesar Rp29.300.000,- realisasi sebesar Rp26.229.577,- atau 89,52%.

7. Analisa Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Tahun 2023 BPFK melakukan program yaitu :

- a. Kemitraan , jejaring kerja dan promosi serta pameran .
- b. Kegiatan Pengampuan di Unit Kalibrasi Mandiri 3 RS Vertikal
- c. kegiatan pelatihan di IPFK Pemerintah dan swasta serta bimtek kalibrasi alat ukur .
- d. Melakukan Sosialisasi layanan melalui webinar dan radio kemenkes serta medsos BPAFK Jakarta.

KPI.9 Persentase ketepatan waktu pelayanan

Ketepatan waktu pelayanan adalah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proses pelayanan sesuai jadwal pelaksanaan.

Target yang ditetapkan 80 %.

Tabel KPI.9

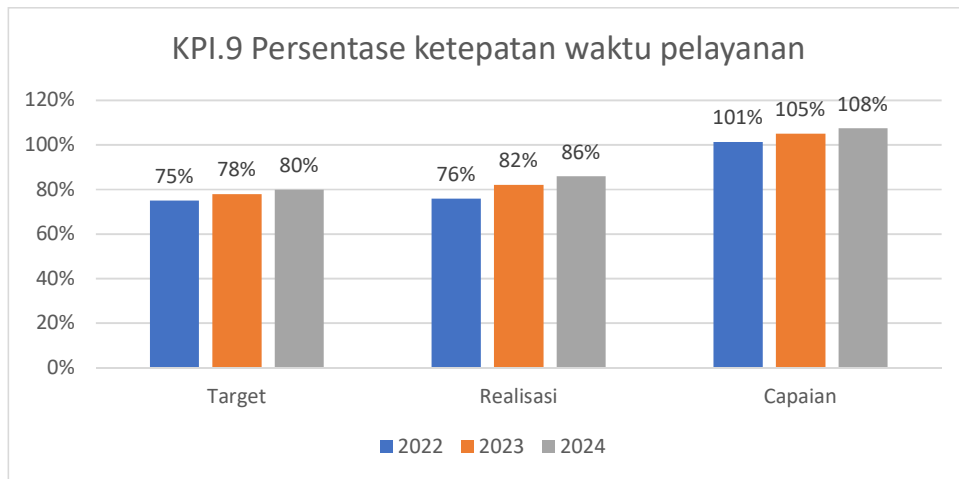
Persentase ketepatan waktu pelayanan

Indikator Kinerja		PIC	Target	Realisasi	Capaian
			2024	2024	
KPI.9	Persentase ketepatan waktu pelayanan	Pelayanan Teknis	80%	86%	108%

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini
Target indikator kinerja yang ditetapkan pada tahun 2024 sebesar 80% dan realisasi kinerja tahun 2024 adalah sebesar 86% atau 108%, maka dapat dinyatakan bahwa kinerja sasaran berdasarkan indikator **Sangat Memuaskan**.
2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja		PIC	Target			Realisasi			Capaian		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
KPI.9	Persentase ketepatan waktu pelayanan	Pelayanan Teknis	75%	78%	80%	76%	82%	86%	101%	105%	105,4%

Gambar Persentase ketepatan waktu pelayanan



Realisasi kinerja Tahun 2024 sebesar 86%, Tahun 2023 sebesar 82% dan Tahun 2022 sebesar 76% sedangkan capaian kinerja Tahun 2024 sebesar 108%, Tahun 2023 sebesar 105% dan Tahun 2022 sebesar 101%.

3. Membandingkan realisasi kinerja Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi
 4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional (Jika Ada). Tidak ada Acuan atau pun Standar Nasional yang bisa dibandingkan.
1. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan
 - a. Analisa penyebab keberhasilan kinerja
 1. Pembuatan aplikasi untuk pelanggan (SIPATEN) yang terintegrasi dengan aplikasi SIMPEL untuk melakukan permintaan dan konfirmasi
 2. Peningkatan perjanjian Kerjasama (MoU) pelayanan dengan beberapa RS Vertikal, RS Pemerintah Daerah dan RS Swasta.
 3. Pelaksanaan kegiatan verifikasi dan koordinasi serta pemantauan pelayanan BPFK Jakarta
 4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi layanan
 - b. Analisa penyebab kendala
 1. Belum optimalnya koordinasi saat persiapan dan pelaksanaan

2. Penundaan layanan karena alkes yang akan kalibrasi masih digunakan oleh pasien difasyankes
6. Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Alokasi anggaran yang tersedia sebesar Rp82.832.000,- terealisasi sebesar Rp77.698.030 atau 93,80%.
Substansi Pelayanan Teknis melakukan persiapan layanan/survey, koordinasi dan monitoring pelayanan serta Evaluasi kerjasama/ MOU
Dengan adanya integrasi aplikasi maka substansi Pelayanan Teknis mempermudah melakukan koordinasi dan monitoring pelayanan serta Melakukan penyesuaian jadwal
7. Analisa Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.
Meningkatkan kompetensi SDM dan mutu layanan melalui akreditasi layanan

KPI.10 Terselenggaranya integrasi sistem informasi layanan berbasis digital
Integrasi Sistem Informasi Layanan Berbasis Digital adalah sistem informasi yang mencakup modul layanan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.
Target yang ditetapkan pada tahun 2024 1 Sistem.

Tabel KPI.10

Terselenggaranya integrasi sistem informasi layanan berbasis digital

Indikator Kinerja		PIC	Target	Realisasi	Capaian
			2024	2024	
KPI.10	Terselenggaranya integrasi sistem informasi layanan berbasis digital	Administrasi Umum	1 Sistem	1	100%

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini
Target indikator kinerja yang ditetapkan pada tahun ini sebesar 1 Sistem dan realisasi kinerja tahun ini sebesar 1 Sistem, maka dinyatakan bahwa kinerja sasaran berdasarkan indikator itu **Memuaskan**.

2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir
 Capaian Indikator tahun 2024 sebesar 1 sistem dana capaian tahun 2023 1 sistem sedangkan tahun 2022 tidak dapat dibandingkan karena tahun 2022 tidak ada indikator tersebut.

Indikator Kinerja		PIC	Target			Realisasi			Capaian		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
KPI.10	Terselenggaranya integrasi sistem informasi layanan berbasis digital	Administrasi Umum	0	1	1	0	1	1	0	100%	100%

3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi
 Capaian Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan jangka menengah karena tahun 2023 dan 2022 tidak ada indikator tersebut
4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional (Jika Ada)
5. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan
 Analisa penyebab keberhasilan :
 1. Adanya koordinasi yang baik dari semua pihak terkait
6. Analisa atas efisiensi penggunaan Sumber Daya
 Alokasi anggaran dalam DIPA tahun 2024 sebesar Rp198.000.000,- terealisasi sebesar Rp196.000.000,- atau 98,99%.
7. Analisa Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja
 Faktor penunjang keberhasilan :
 1. Telah di terapkannya sistem informasi pelayanan pada Aplikasi SIMPEL.
 2. Melakukan koordinasi antara BPFK dengan sarpelkes

KPI.11 Kenaikan nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
 AKIP atau akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan capaian kinerja dalam 1 tahun anggaran yang selaras dengan Perjanjian Kinerja.
 Target yang ditetapkan di tahun 2024 sebesar 5 poin.

Tabel KPI.11

Kenaikan nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Indikator Kinerja		PIC	Target	Realisasi	Capaian
			2024	2024	
KPI.11	Kenaikan nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Administrasi Umum	5 Poin	6	120%

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini.
 Target indikator kinerja yang ditetapkan sebesar 5 poin dan realisasi kinerja tahun ini sebesar 6 atau 120%, maka dinyatakan bahwa kinerja sasaran berdasarkan indikator itu **sangat memuaskan**.
2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja		PIC	Target			Realisasi			Capaian		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
KPI.11	Kenaikan nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Administrasi Umum	-	-	5 Poin	-	-	6	-	-	120%

3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan akhir tahun 2024 yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi
 Capaian Indikator 2024 tidak dapat dibandingkan dengan jangka menengah karena tahun 2023 dan 2022 tidak ada indikator tersebut, tetapi tahun tahun 2023 dan 2022 termasuk pada indikator Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah, dimana dari tahun 2022 ke tahun 2023 terjadi peningkatan dari penilaian BB menjadi A.

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional (Jika Ada)

Jika dibandingkan dengan Standar Nasional tidak ada.

5. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Analisa penyebab keberhasilan :

Adanya koordinasi yang baik dari semua pihak terkait

6. Analisa atas efisiensi penggunaan Sumber Daya

Alokasi anggaran dalam DIPA tahun 2024 sebesar Rp18.250.000,- terealisasi sebesar Rp18.250.000,- atau 100%.

7. Analisa Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan atau pun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Mengikuti peningkatan SDM atau workshop akuntabilitas kinerja satker

KPI.12 Jumlah prototipe produk alkes yang diuji BPAFK

Prototipe produk alkes adalah produk alat kesehatan yang belum memiliki izin edar.

Target yang ditetapkan di tahun 2024 sebesar 550

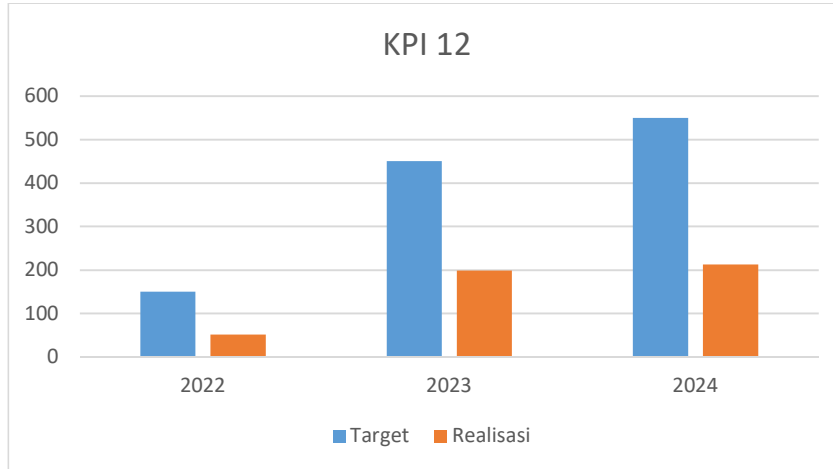
Tabel KPI.12

Jumlah prototipe produk alkes yang diuji BPAFK

Indikator Kinerja		PIC	Target	Realisasi	Capaian
			2024	2024	
KPI.12	Jumlah prototipe produk alkes yang diuji BPAFK	Pelayanan Teknis	550	552	100,36%

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini.

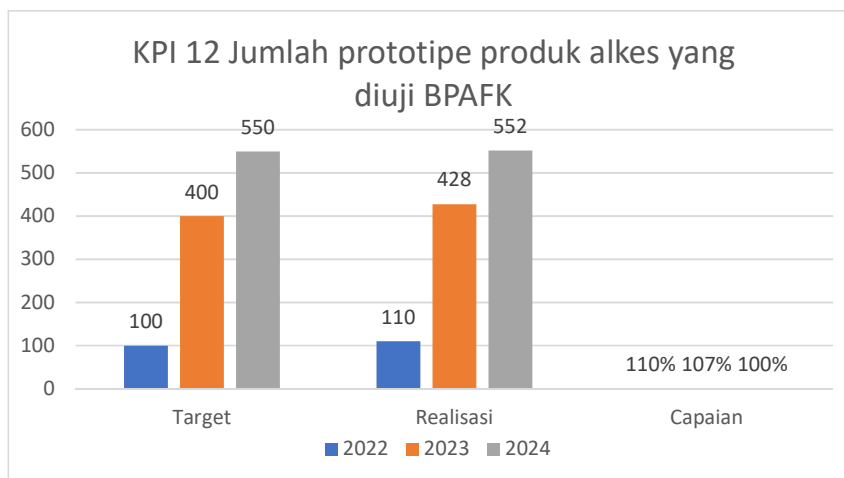
Target indikator kinerja yang ditetapkan sebesar 550 unit dan realisasi kinerja tahun ini sebesar 552 unit atau 100,36%, maka dinyatakan bahwa capaian indikator tersebut **Memuaskan.**



Gambar Jumlah prototipe produk alkes yang diuji BPAFK

- 2 Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	PIC	Target			Realisasi			Capaian			
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
KPI.12	Jumlah prototipe produk alkes yang diuji BPAFK	Pelayanan Teknis	100	400	550	110	428	552	110%	107%	100,36 %



Realisasi kinerja Tahun 2024 sebesar 552 unit , Tahun 2023 sebesar 428 unit dan Tahun 2022 sebesar 110 unit sedangkan capaian kinerja Tahun

2024 sebesar 100,36%, Tahun 2023 sebesar 107% dan Tahun 2022 sebesar 110%.

3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi
4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional (Jika Ada)
5. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan
Analisa penyebab keberhasilan:
 - 552 unit prototipe telah diuji produk dari 89 Produsen terdapat 507 unit selesai sertifikat dan 38 unit sedang proses laporan serta 7 unit telah perbaikan
 - Melakukan pengadaan alat ukur uji produk dan renovasi laboratorium
 - Meningkatkan kerjasama dengan produsen alkes dan asosiasinya serta stake holder terkait
6. Analisa atas efisiensi penggunaan Sumber Daya
Pagu anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp436.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.436.000.000 atau 100%, merupakan pembelian alat ukur uji produk dan juga dilakukan optimalisasi penggunaan alat ukur dan SDM bersama laboratorium kalibrasi alkes , laboratorium PRUK serta Sarana Prasarana
7. Analisa Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja
Faktor keberhasilan:
 - Meningkatkan kompetensi SDM dan penggunaan metode / standar nasional serta internasional.
 - Meningkatkan koordinasi lintas program dan sectoral bersama Ditjen Farmalkes, BRIN dan SNSU/BSN serta BAPETEN

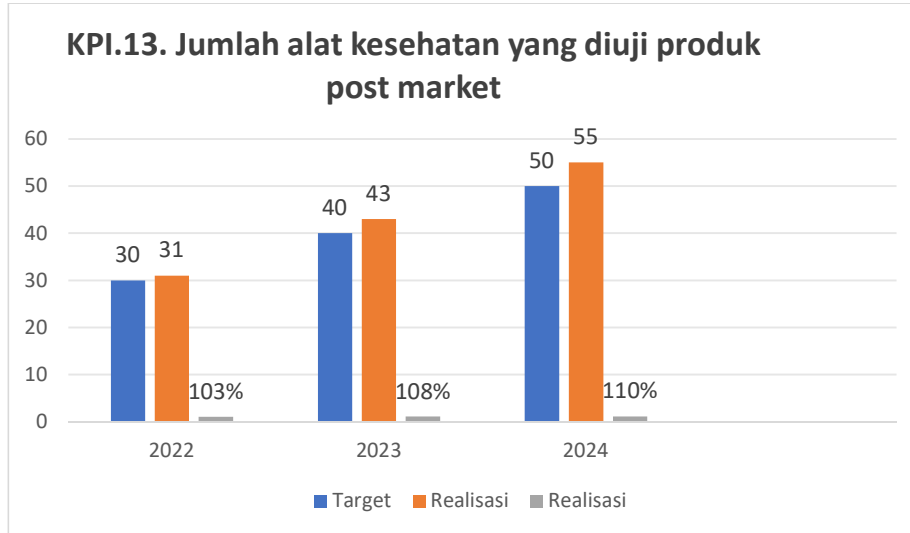
KPI.13 Jumlah alat kesehatan yang diuji produk post market
 Uji produk post market merupakan uji kualitas alat yang beredar di pasaran dan sudah memiliki izin edar.
 Target yang ditetapkan di tahun 2024 sebesar 50.

Tabel KPI.13
 Jumlah alat kesehatan yang diuji produk post market

Indikator Kinerja		PIC	Target	Realisasi	Capaian
			2024	2024	
KPI.13	Jumlah alat kesehatan yang diuji produk post market	Pelayanan Teknis	50	55	110% -

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini.
 Target indikator kinerja yang ditetapkan sebesar 50 unit dan realisasi kinerja tahun ini sebesar 55 atau 110%, maka dinyatakan bahwa indicator kinerja **Sangat Memuaskan**.
2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja		PIC	Target			Realisasi			Capaian		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
KPI.13	Jumlah alat kesehatan yang diuji produk post market	Pelayanan Teknis	30	40	50	31	43	55	103%	108%	110%



Indikator kinerja ini baru ada tahun 2024 dan tidak terdapat pada tahun 2023 dan 2022

3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Capaian Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan jangka menengah karena tahun 2022 dan 2023 tidak ada indikator tersebut

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional (Jika Ada)
5. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Analisa penyebab keberhasilan:

- Terdapat 55 unit alat kesehatan telah diuji dari 26 Produsen/distributor
 - Penyusunan Metode kerja Pengujian post market general requirment bersama ditjen Farmalkes
 - Melakukan kerjasama dengan produsen / pelanggan untuk melaksanakan uji tersebut
6. Analisa atas efisiensi penggunaan Sumber Daya
 - Alokasi anggaran sebesar Rp138.056.000,- terealisasi sebesar 131.016.000,- atau 94,90%
 - Pelanggan /Produsen melakukan permintaan uji secara mandiri bersifat swadana dan menjadi pendapatan BLU BPAFK

- 7 Analisa Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Faktor keberhasilan:

Melakukan kerjasama dengan produsen / pelanggan untuk melaksanakan uji tersebut

- KPI.14 Jumlah alat kesehatan yang dilakukan kalibrasi
 Pengujian kalibrasi/inspeksi alat kesehatan di fasyankes.
 Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 45000.

Tabel KPI.14
 Jumlah alat kesehatan yang dilakukan kalibrasi

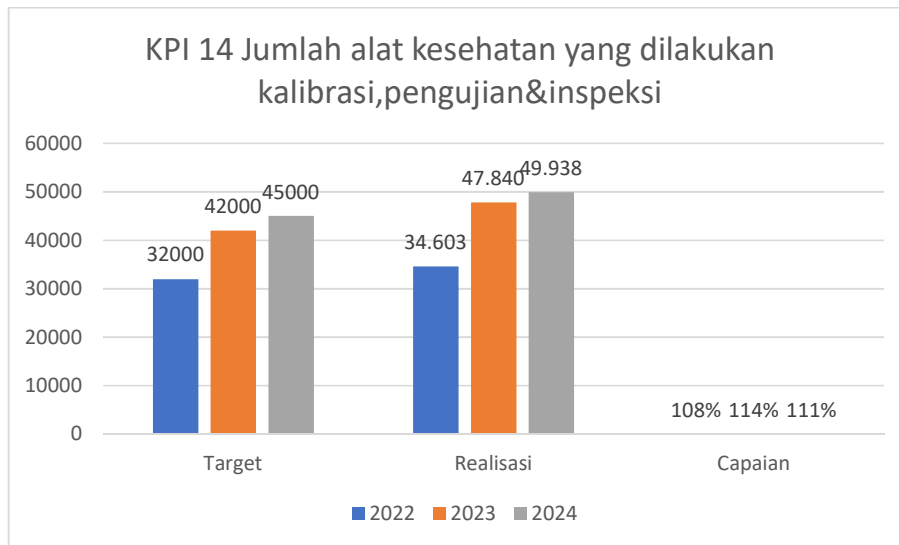
Indikator Kinerja		PIC	Target	Realisasi	Capaian
			2024	2024	
KPI.14	Jumlah alat kesehatan yang dilakukan kalibrasi	Pelayanan Teknis	45.000	49.938	110,97 %

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini
 Target indikator kinerja yang ditetapkan tahun ini adalah 45.000 alat dan realisasi kinerja tahun ini sebesar 49.938 alat atau 110,97%, maka dinyatakan bahwa capaian indikator tersebut **Sangat Memuaskan.**
2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja		PIC	Target			Realisasi			Capaian		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
KPI.14	Jumlah alat kesehatan yang dilakukan kalibrasi	Pelayanan Teknis	31.000	42.000	45.000	34.603	47.840	49.938	108%	114%	110,97%

Realisasi kinerja Tahun 2024 sebesar 49.938 unit, Tahun 2023 sebesar 47,840 unit dan Tahun 2022 sebesar 34.603 unit sedangkan capaian kinerja

Tahun 2024 sebesar 110%, Tahun 2023 sebesar 114% dan Tahun 2022 sebesar 108%.



Gambar Jumlah alat kesehatan yang dilakukan kalibrasi

3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi
4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional (Jika Ada)
Tidak ada Acuan atau pun Standar Nasional yang bisa dibandingkan.
5. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan
 - Analisa penyebab keberhasilan capaian target :
 1. Menambah jumlah sumber daya manusia dan alat ukur serta sarana prasarana yang dimiliki BPAFK Jakarta
 2. Terdapat 49.431 Sertifikat/Laporan dari layanan Inst/Lab Kalibrasi alkes 45.319 unit, Pengujian Proteksi Radiasi dan Kesesuaian Pesawat sinar X 972 unit, Kalibrasi Alat Ukur Standar 2.180 unit, dan Lab Dosimetri 463 unit serta instalasi inpeksi 497 unit
 3. Meningkatnya jumlah pelanggan dan jenis alat kesehatannya
6. Analisa atas efisiensi penggunaan Sumber Daya

- Alokasi anggaran sebesar Rp4.472.934.000,- realisasi sebesar Rp4.390.169.568 atau 98,15%.
 - Menambah sarana layanan antara lain kantor unit Bandung selain UPFK Palembang dan mendapatkan izin penggunaan gedung ex BKPK untuk layanan uji produk dan BPFK Academy
7. Analisa Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja
- Mengoptimalkan Program Peningkatan Kompetensi SDM BPAFK Jakarta
 - Meningkatkan program jejaring kerja dengan pengampunan pada unit kalibrasi mandiri RSCM, RS Kariadi, RSPJN Harapan Kita
 - Menjalin program kalibrasi kemitraan dengan PT B Braun Indonesia dan RS PON dan RS Rotinsulu.

KPI.15 Persentase sarana distribusi alat kesehatan non-PIE yang diinspeksi paska sertifikasi CDAKB

Inspeksi/Audit sarana distribusi alat kesehatan non PIE setelah mendapatkan sertifikat CDAKB

Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 30%.

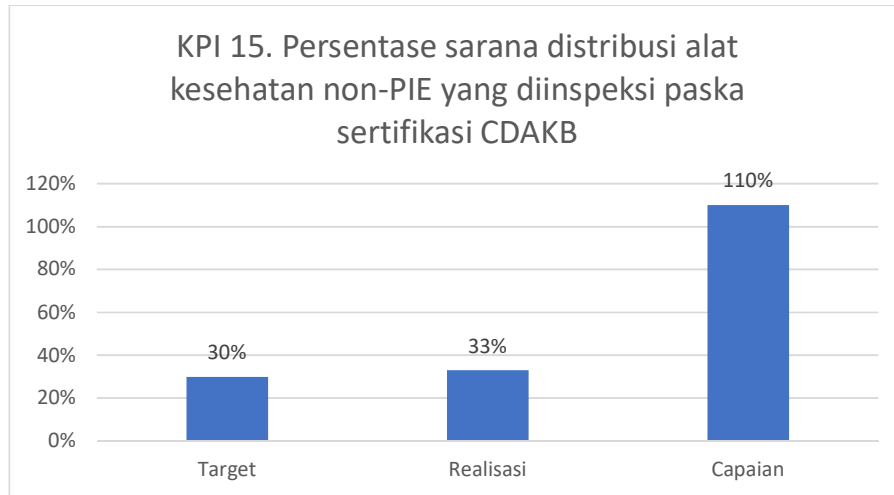
Tabel KPI.15

Persentase sarana distribusi alat kesehatan non-PIE yang diinspeksi paska sertifikasi CDAKB

Indikator Kinerja		PIC	Target	Realisasi	Capaian
			2024	2024	
KPI.15	Persentase sarana distribusi alat kesehatan non-PIE yang diinspeksi paska sertifikasi CDAKB	Pelayanan Teknis	30%	33%	110%

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini
Target indikator kinerja yang ditetapkan tahun ini adalah 30% dan realisasi tahun ini 33% atau 110%, maka dinyatakan bahwa indicator kinerja tersebut **Sangat Memuaskan.**

2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir



Indikator Kinerja	PIC	Target			Realisasi			Capaian		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
KPI. 15 Persentase sarana distribusi alat kesehatan non-PIE yang diinspeksi paska sertifikasi CDAKB	Pelayanan Teknis	0	0	30%	0	0	33%	0	0	110%

Indikator kinerja ini baru ada tahun 2024 dan tidak terdapat pada tahun 2023 dan 2022

3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi
Capaian Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan jangka menengah karena tahun 2022 dan 2023 tidak ada indikator tersebut
4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional (Jika Ada)
5. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan
Analisa penyebab keberhasilan:

- Melakukan inspeksi pasca sertifikasi distributor : 2 di Bengkulu, 4 di Sumatera Selatan, 4 di Lampung, 8 di DKI Jakarta, dan 10 di Jawa Barat, serta 5 di Banten
- Melakukan lintas program dan sektoran bersama ditjen farmalkes dan dengan dinas kesehatan untuk melaksanakan audit CDAKB.

6 Analisa atas efisiensi penggunaan Sumber Daya

- Alokasi anggaran pada kegiatan ini semula sebesar Rp237.375.000,- dan realisasi 48,84%, ada efisiensi perjalanan dinas dari eselon 1 Farmalkes sebesar Rp103.446.000,- sehingga pagu alokasi menjadi sebesar 133.929.000,- dengan realisasi sebesar Rp115.923.020 atau 88,56%. Dengan melakukan audit di 33 perusahaan telah selesai melakukan perbaikan (status CAPA Close) konsisten memenuhi standar CDAKB Menggunakan anggaran rupiah murni dan belum menjadi pendapatan BLU BPAFK

7 Analisa Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Faktor keberhasilan:

Melakukan lintas program dan sektoran bersama ditjen farmalkes dan dengan dinas kesehatan untuk melaksanakan audit CDAKB.

KPI.16 Jumlah metode pengujian jenis produk alkes yang dikembangkan BPAFK
 Jumlah Metode yang dikembangkan BPAFK untuk menguji parameter atau jenis produk baru yang sebelumnya belum bisa dilakukan ditambah jumlah yang sudah tersedia

Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 70.

Tabel KPI.16

Jumlah metode pengujian jenis produk alkes yang dikembangkan BPAFK

Indikator Kinerja		PIC	Target	Realisasi	Capaian
			2024	2024	
KPI.16	Jumlah metode pengujian jenis produk alkes yang dikembangkan BPAFK	Tata Operasioanl	70	70	100%

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini
Target indikator kinerja yang ditetapkan tahun ini adalah 70 metode dan realisasi kinerja adalah 70 metode, merupakan capaian **memuaskan**.
2. Realisasi kinerja tahun ini tidak dapat dibandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir karena Jumlah metode pengujian jenis produk alkes yang dikembangkan merupakan KPI baru pada tahun 2024.

Indikator Kinerja		PIC	Target			Realisasi			Capaian		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
KPI.16	Jumlah metode pengujian jenis produk alkes yang dikembangkan BPAFK	Tata Operasi oanl	-	-	70	-	-	70	-	-	100%

Pada indicator kinerja ini tidak dapat dibandingkan karena tahun 2022, tahun 2023 indikator kinerja tersebut tidak tersedia.

3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi
Indikator kinerja tidak dapat dibandingkan realisasi kinerja sampai dengan target jangka menengah karena pada tahun 2022 dan tahun 2023 indikator kinerja tidak tersedia.
4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional (Jika Ada)

Tidak ada Acuan atau pun Standar Nasional yang bisa dibandingkan.

5. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan
Analisa penyebab keberhasilan capaian target :
Kebutuhan metode pengujian untuk layanan uji produk yang dilakukan oleh BPAFK Jakarta.
6. Analisa atas efisiensi penggunaan Sumber Daya
 - Alokasi anggaran dalam DIPA sebesar Rp89.400.000,- dan realisasi sebesar Rp89.400.000,- atau 100%.
 - Pelaksanaan kegiatan harus ber-azaskan kepada kewajaran, transparansi, dan efisiensi serta pembiayaan mengacu pada standar biaya umum (SBU)
 - Pembahasan dan Penyusunan Metode pengujian dilakukan melalui pertemuan atau rapat yang melibatkan penanggungjawab/PIC pelaksana kegiatan, dan pelaksanaan ini mayoritas dilakukan di dalam kantor, dan hanya finalisasi dilakukan pembahasan di luar kantor karena jumlah peserta yang terlibat melebihi kapasitas ruang rapat kantor dan memanggil narasumber dari KAN.
7. Analisa Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja
Ketersediaan standar acuan dalam menyusun metode.

KPI.17 Nilai kinerja anggaran

Nilai Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran.

Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 80,1.

Tabel KPI.17
Nilai kinerja anggaran

Indikator Kinerja		PIC	Target	Realisasi	Capaian
			2024	2024	
KPI.17	Nilai kinerja penganggaran BPAFK Jakarta	Administrasi Umum	80,1	94,72	118,25%

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini
Target indikator kinerja yang ditetapkan tahun ini adalah 80,1 dan realisasi kinerja sampai dengan Desember 2024 sebesar 94,72 capaian 118,25% dengan kategori **sangat memuaskan**.
2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir
Pada indicator kinerja ini tidak dapat dibandingkan karena tahun 2023, tahun 2022 indikator nilai kinerja anggaran tersebut tidak ada.
3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi
Indikator kinerja tidak dapat dibandingkan realisasi kinerja sampai dengan target jangka menengah karena pada tahun 2023 dan tahun 2022 indikator kinerja tidak tersedia.
4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional (Jika Ada)
Tidak ada Acuan atau pun Standar Nasional yang bisa dibandingkan.
5. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan
Nilai Kinerja Anggaran triwulan IV 2024 sebesar 94,72 Hasil NKA BPAFK Jakarta merupakan hasil penjumlahan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (100) yang telah dikali dengan bobot 50% yakni 50,00 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (89,43) yang telah dikali dengan bobot 50% yakni 44,72.
6. Analisa atas efisiensi penggunaan Sumber Daya

Kegiatan dalam rangka mendukung Nilai Kinerja Anggaran merupakan nilai kinerja mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

7. Analisa Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja
 Mengikuti bimbingan teknis terkait penilaian IKPA

KPI.18 Persentase realisasi target pendapatan BLU

Persentase Realisasi Target Pendapatan BLU adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas balai selama 1 (satu) periode yang mengakibatkan penambahan ekuitas bersih. Pendapatan yang berasal dari APBN/RM tidak diperhitungkan.

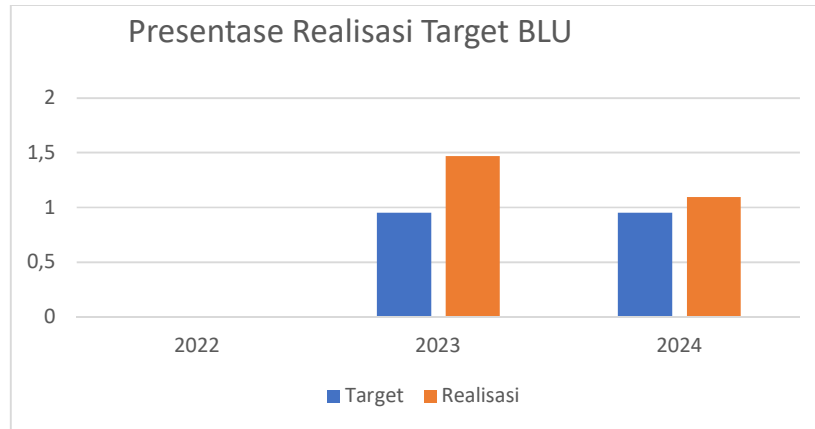
Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 95%

Tabel KPI.18
 Persentase realisasi target pendapatan BLU

Indikator Kinerja		PIC	Target	Realisasi	Capaian
			2024	2024	
KPI.18	Persentase realisasi target pendapatan BLU	Administrasi Umum	95%	109,64%	115,41%

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini
 Target indikator kinerja yang ditetapkan tahun ini adalah 95% dan realisasi kinerja sampai Desember tahun 2024 ini sebesar 109,64%, atau sebesar 115,41%, dengan hasil **sangat memuaskan**.
2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja		PIC	Target			Realisasi			Capaian		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
KPI.18	Persentase realisasi target pendapatan BLU	Administrasi Umum	0	95%	95%	0%	147%	109,64%	-	155%	115,41%



Capaian sampai dengan Desember tahun 2024 sebesar 115,41%, namun pada tahun 2023 sangat signifikan kenaikannya sebesar 155%.

3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Realisasi pada tahun 2024 jika dibandingkan dengan target jangka menengah terjadi peningkatan 1%.

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional (Jika Ada)

Tidak ada Acuan atau pun Standar Nasional yang bisa dibandingkan.

5. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Analisa penyebab peningkatan pendapatan target : Melakukan koordinasi semua terkait (Customer, tim penagihan dan penanggungjawab/PIC).

6. Analisa atas efisiensi penggunaan Sumber Daya

Pada indikator kinerja Persentase realisasi target pendapatan BLU dialokasi dana semula sebesar Rp6.106.718.000 namun ada efisiensi pada perjalanan dinas dalam kota sebesar Rp1.067.000,- dari eselon 1 sehingga menjadi Rp6.105.651.000,- dengan realisasi sebesar Rp5.786.739.045,- atau 94,76%.

7. Analisa Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Melakukan koordinasi semua terkait (Costumer, tim penagihan dan penanggungjawab/PIC).

KPI.19 Persentase Realisasi Anggaran

Persentase realisasi anggaran adalah realisasi belanja dibandingkan dengan jumlah anggaran di dalam suatu periode sesuai DIPA.

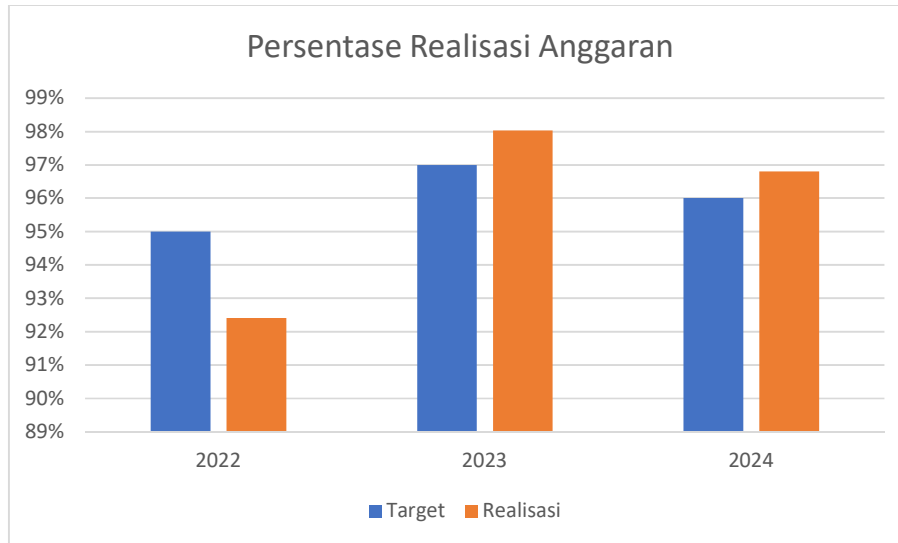
Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 96%

Tabel KPI.19
Persentase Realisasi Anggaran

Indikator Kinerja		PIC	Target	Realisasi	Capaian
			2024	2024	
KPI.19	Persentase Realisasi Anggaran	Administrasi Umum	96%	96,60%	100,63%

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini
Target indikator kinerja yang ditetapkan tahun ini adalah 96% dan realisasi kinerja tahun ini sebesar 96,60% atau 100,63% **sangat memuaskan**.
2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja		PIC	Target			Realisasi			Capaian		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
KPI.19	Persentase Realisasi Anggaran	Administrasi Umum	95%	97%	96%	92,42%	98%	96,60%	97%	101%	100,63%



Capaian indikator kinerja Presentase Realisasi Anggaran tahun 2024 sebesar 100,63%, tahun 2023 sebesar 101% dan 2022 sebesar 101%, jika dibandingkan capaian 2024 terdapat peningkatan.

3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Realisasi capaian kinerja tahun 2024 jika dibandingkan dengan target jangka menengah.

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional (Jika Ada)

Tidak ada Acuan atau pun Standar Nasional yang bisa dibandingkan.

5. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Analisa penyebab kegagalan :

- a. Terdapat kegiatan yang sudah dilaksanakan belum dilakukan pembayaran di bulan Desember 2024 (Honor PPNPN bulan Desember, Renovasi Gedung, Belanja BMHP, Rekalibrasi dan belanja keperluan kantor) dengan jumlah total Rp800.366.601,-)
- b. Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran sesuai dengan Rencana Penarikan Dana (RPD)

6. Analisa atas efisiensi penggunaan Sumber Daya

Alokasi anggaran untuk kegiatan pada indikator kinerja tahun 2024 sebesar Rp13.580.818.000,- dengan realisasi sebesar Rp13.341.173.336,- atau 98.24%.

- 7 Analisa Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja
 - a. Melakukan koordinasi semua terkait (Bendahara, PPK, Pejabat Pengadaan dan penanggungjawab/PIC)

KPI.20 Persentase rekomendasi hasil audit yang telah tuntas ditindaklanjuti
 Setiap rekomendasi hasil pemeriksaan atau audit yang dilakukan oleh Tim Audit (BPK/APIP) terhadap satker harus tuntas ditindaklanjuti.
 Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 95%

Tabel KPI.20
 Persentase rekomendasi hasil audit yang telah tuntas ditindaklanjuti

Indikator Kinerja		PIC	Target	Realisasi	Capaian
			2024	2024	
KPI.20	Persentase rekomendasi hasil audit yang telah tuntas ditindaklanjuti	Administrasi Umum	95%	100%	105%

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini
 Target indikator kinerja yang ditetapkan tahun ini adalah 95% dan realisasi kinerja tahun ini tidak ada temuan audit untuk 2024.
2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja		PIC	Target			Realisasi			Capaian		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
KPI.20	Persentase rekomendasi hasil audit yang telah tuntas ditindaklanjuti	Administrasi Umum	0	0	95%	0	0	100	0	0	105%

Pada indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan karena tahun 2023, tahun 2022 indikator kinerja tersebut tidak tersedia.

3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Indikator kinerja tidak dapat dibandingkan realisasi kinerja sampai dengan target jangka menengah karena mengikuti program dari eselon 1 Dirjen Farmalkes.

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional (Jika Ada)

Tidak ada Acuan atau pun Standar Nasional yang bisa dibandingkan.

5. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Analisa penyebab keberhasilan capaian target :

Melakukan tindaklanjut temuan BPK atas Laporan Keuangan Tahun 2023 dan sudah selesai.

6. Analisa atas efisiensi penggunaan Sumber Daya

Pertemuan pembahasan tindaklanjut atas hasil Audit TIM BPK difasilitasi oleh Biro keuangan dan BMN, pertemuan dilaksanakan secara luring di Aula Gedung Suyudi Kemenkes, dan dari satker merupakan tamu undangan.

7. Analisa Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Agar dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa lebih selektif dalam memilih penyedia yang mengikuti tender.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun sebagai pelaksanaan kinerja Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Jakarta serta sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Jakarta Tahun 2024. Laporan LAKIP Tahun 2024 merupakan laporan capaian kinerja pertama setelah BPAFK Jakarta ditetapkan sebagai UPT Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan terhitung bulan Januari 2024, tentunya ada beberapa indikator kinerja yang tahun sebelumnya belum ada.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dari sasaran dan kegiatan Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Jakarta Tahun 2024 secara umum **berhasil dan Memuaskan** mencapai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan dengan Kepala Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Jakarta.

Pencapaian Kinerja pada tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi parameter bahwa kegiatan-kegiatan tersebut dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan (RPD/RPK) agar realisasi anggaran lebih meningkat, Sedangkan hal-hal yang menghambat tercapainya target diharapkan dapat ditemukan solusi serta alternatif penyelesaiannya dengan mengedepankan profesionalisme di lingkungan Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Jakarta.

Untuk itu perlu dikembangkan inovasi-inovasi program yang mendukung terhadap kebijakan Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2024-2028, dengan melakukan inovasi diharapkan pencapaian indikator kinerja Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Jakarta yang ada pada Renstra Kemkes 2024-2028 dapat tercapai.

Selain melakukan inovasi, yang akan dilakukan adalah melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan mengoptimalkan sistem informasi yang saling terintegrasi baik di internal maupun eksternal Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Jakarta, diharapkan dengan adanya Monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja dapat menjadi acuan dalam menetapkan kebijakan untuk mencapai target kinerja.

- Lampiran – lampiran :
1. Perjanjian Kinerja

**DIREKTORAT JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
BALAI PENGAMANAN ALAT DAN FASILITAS KESEHATAN
(BPAFK) JAKARTA**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Subadri, ST., M.Si.
Jabatan : Kepala Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Jakarta
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Dra. L. Rizka Andalusia, Apt, M.Pharm, MARS
Jabatan : Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 11 November 2024

Pihak Kedua,  Dr. Dra. L. Rizka Andalusia, Apt, M.Pharm, MARS NIP. 196802261994032004	Pihak Pertama  Subadri, ST., M.Si. NIP. 197611122005011003
---	---

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PENGAMANAN ALAT DAN FASILITAS KESEHATAN
(BPAFK) JAKARTA

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN		
	Meningkatnya mutu alat kesehatan di peredaran	Persentase alat kesehatan yang memenuhi syarat	95
	Kegiatan : Peningkatan Pengawasan Alat Kesehatan (Alkes) dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)		
	Terwujudnya peningkatan kepuasan <i>stakeholder</i>	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82
	Terwujudnya pengelolaan keuangan yang sehat dan akuntabel	Perolehan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)	29.311.918.800,-
	Peningkatan cakupan jenis pelayanan sarana, prasarana, dan alat SPA	1. Penambahan ruang lingkup pelayanan yang terakreditasi	16
		2. Penambahan ruang lingkup pelayanan	23
	Peningkatan ketercapaian standar pelayanan minimum	Persentase ketepatan waktu penerbitan sertifikat/LHU sesuai SPM	75
	Meningkatnya kualitas sarana, prasarana, dan alat (SPA) fasilitas pelayanan kesehatan rujukan	Persentase peralatan yang telah dikalibrasi	65
	Terwujudnya pemenuhan SDM yang kompeten	Persentase SDM ASN yang telah mengikuti pelatihan	95
	Terselenggaranya pelayanan <i>center of excellence</i> di BPAFK secara optimal	1. Terselenggaranya layanan unggulan bertaraf internasional	1
		2. Persentase ketepatan waktu pelayanan	80
		3. Terselenggaranya integrasi sistem informasi layanan berbasis digital	1

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Mempunyai tata kelola keuangan melalui badan layanan umum	Kenaikan nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	5
	Meningkatnya pengawasan sarana dan produk alat kesehatan dan PKRT	1. Jumlah prototipe produk alkes yang diuji BPAPK	550
		2. Jumlah alat kesehatan yang diuji produk <i>post market</i>	50
		3. Jumlah alat kesehatan yang dilakukan kalibrasi	45.000
		4. Persentase sarana distribusi alat kesehatan non-PIE yang diinspeksi paska sertifikasi CDAKB	30
		5. Jumlah metode pengujian jenis produk alkes yang dikembangkan BPAPK	70
II	Program Dukungan Manajemen		
	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan	Nilai kinerja anggaran	80,1
		Persentase realisasi anggaran	96
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti	95

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Kegiatan : Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan			
	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	1. Nilai kinerja penganggaran BPAPK Jakarta	80,1
		2. Persentase realisasi target pendapatan BLU	95
		3. Persentase Realisasi Anggaran	96
		4. Persentase rekomendasi hasil audit yang telah tuntas ditindaklanjuti	95

Kegiatan

1. Peningkatan Pengawasan Alat Kesehatan dan PKRT
2. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Program

Anggaran Rp 52.130.975.000,-

Program Pelayanan Kesehatan dan JKN Rp 32.443.439.000,-

Program Dukungan Manajemen Rp 19.687.536.000,-

Jakarta, 11 November 2024

Pihak Kedua,



Dr. Dra. L. Rizka Andalusia, Apt, M.Pharm, MARS
NIP. 196802261994032004

Pihak Pertama



Subadri, ST., M.Si.
NIP. 197611122005011003

2. Laporan realisasi anggaran

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 024
ESELON I : 07
WILAYAH/PROVINSI : 0100
SATUAN KERJA : 690804
JENIS SATUAN KERJA : K8

KEMENTERIAN KESEHATAN
DITJEN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
DKJ JAKARTA
BALAI PENGAMANAN ALAT DAN FASILITAS KESEHATAN JAKARTA

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 24/01/25 1:44 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 24/1/25 8:54 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	4,081,771,000	4,589,030,000	4,589,029,200	0	4,589,029,200	100	800
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	120,000	69,000	66,396	2,419	63,977	92.72	5,023
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	318,500,000	360,004,000	360,002,600	0	360,002,600	100	1,400
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	112,312,000	116,484,000	116,481,702	0	116,481,702	100	2,298
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	25,200,000	24,660,000	24,660,000	540,000	24,120,000	97.81	540,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	386,400,000	413,996,000	413,996,000	840,000	413,156,000	99.8	840,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	15,400,000	51,208,000	51,206,152	0	51,206,152	100	1,848
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	272,338,000	265,565,000	265,564,140	0	265,564,140	100	860
511129	Belanja Uang Makan PNS	492,972,000	554,815,000	494,305,000	0	494,305,000	89.09	60,510,000
511134	Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS	329,536,000	358,356,000	301,750,000	0	301,750,000	84.2	56,606,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	123,200,000	112,375,000	112,375,000	0	112,375,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	6,157,749,000	6,846,562,000	6,729,436,190	1,382,419	6,728,053,771	98.27	118,508,229
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	0	222,384,000	222,384,000	0	222,384,000	100	0
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0	4,000	3,558	0	3,558	88.95	442
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	0	7,689,000	7,688,640	0	7,688,640	100	360
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	0	2,692,000	2,691,024	0	2,691,024	99.96	976
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	0	28,800,000	28,800,000	0	28,800,000	100	0
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	0	10,000,000	9,993,960	0	9,993,960	99.94	6,040
511628	Belanja Uang Makan PPPK	0	40,428,000	29,834,000	0	29,834,000	73.8	10,594,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	0	311,997,000	301,395,182	0	301,395,182	96.6	10,601,818
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	5,868,000	41,352,000	16,079,000	0	16,079,000	38.88	25,273,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	5,868,000	41,352,000	16,079,000	0	16,079,000	38.88	25,273,000
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito							
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	5,029,693,000	6,059,092,000	5,993,813,408	0	5,993,813,408	98.92	65,278,592
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	0	313,815,000	294,818,975	0	294,818,975	93.95	18,996,025
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	5,029,693,000	6,372,907,000	6,288,632,383	0	6,288,632,383	98.68	84,274,617
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	11,193,310,000	13,572,818,000	13,335,542,755	1,382,419	13,334,160,336	98.24	238,657,664
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Kebutuhan Perkantoran	4,537,775,000	2,574,687,000	2,519,602,018	0	2,519,602,018	97.86	55,084,982

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 024
 ESELON I : 07
 WILAYAH/PROVINSI : 0100
 SATUAN KERJA : 690804
 JENIS SATUAN KERJA : K8

KEMENTERIAN KESEHATAN
 DITJEN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
 DKI JAKARTA
 BALAI PENGAMANAN ALAT DAN FASILITAS KESEHATAN JAKARTA

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 24/01/25 1:44 PM
 Halaman : 2
 Prtg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
 Tgl Data : 24/1/25 8:54 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	620,640,000	376,080,000	373,118,768	0	373,118,768	99.21	2,961,232
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	82,500,000	88,000,000	75,812,300	0	75,812,300	86.15	12,187,700
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	128,208,000	123,600,000	120,664,387	0	120,664,387	97.62	2,935,613
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	5,369,123,000	3,162,367,000	3,089,197,473	0	3,089,197,473	97.69	73,169,527
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	393,575,000	22,160,000	19,418,932	0	19,418,932	87.63	2,741,068
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	882,550,000	205,491,000	204,740,000	0	204,740,000	99.63	751,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	1,276,125,000	227,651,000	224,158,932	0	224,158,932	98.47	3,492,068
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	235,137,000	293,848,000	232,264,962	0	232,264,962	79.04	61,583,038
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	235,137,000	293,848,000	232,264,962	0	232,264,962	79.04	61,583,038
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	500,000,000	639,000,000	622,700,220	0	622,700,220	97.45	16,299,780
522112	Belanja Langganan Telepon	27,000,000	16,200,000	14,027,077	0	14,027,077	86.59	2,172,923
522113	Belanja Langganan Air	12,000,000	25,000,000	15,745,969	0	15,745,969	62.98	9,254,031
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	198,000,000	187,000,000	172,903,668	0	172,903,668	92.46	14,096,332
522141	Belanja Sewa	114,600,000	105,600,000	104,400,000	0	104,400,000	98.86	1,200,000
522151	Belanja Jasa Profesi	79,600,000	3,600,000	3,600,000	0	3,600,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	931,200,000	976,400,000	933,376,934	0	933,376,934	95.59	43,023,066
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	592,624,000	592,999,000	588,658,585	0	588,658,585	99.27	4,340,415
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,075,062,000	554,692,000	450,516,278	0	450,516,278	81.22	104,175,722
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	1,667,686,000	1,147,691,000	1,039,174,863	0	1,039,174,863	90.54	108,516,137
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,307,381,000	389,045,000	252,906,108	10,705,224	242,200,884	62.26	146,844,116
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	89,140,000	76,160,000	60,712,500	170,000	60,542,500	79.49	15,617,500
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	446,310,000	0	0	0	0	0	0
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	941,358,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	2,784,189,000	465,205,000	313,618,608	10,875,224	302,743,384	65.08	162,461,616
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri							
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	260,238,000	78,931,000	78,529,163	0	78,529,163	99.49	401,837
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242	260,238,000	78,931,000	78,529,163	0	78,529,163	99.49	401,837
5251	Belanja Barang BLU							
525112	Belanja Barang	0	3,457,921,000	3,206,110,106	145,000	3,205,965,106	92.71	251,955,894

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 024
ESELON I : 07
WILAYAH/PROVINSI : 0100
SATUAN KERJA : 690804
JENIS SATUAN KERJA : K3

KEMENTERIAN KESEHATAN
DITJEN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
DKI JAKARTA
BALAI PENGAMANAN ALAT DAN FASILITAS KESEHATAN JAKARTA

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 24/01/25 1:44 PM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 24/1/25 8:54 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
525113	Belanja Jasa	0	344,792,000	340,592,000	0	340,592,000	98.78	4,200,000
525114	Belanja Pemeliharaan	0	703,789,000	681,815,766	0	681,815,766	96.88	21,973,234
525115	Belanja Perjalanan	0	8,533,936,000	8,086,055,560	5,000,000	8,081,055,560	94.69	452,880,440
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	0	934,000,000	882,858,683	0	882,858,683	94.52	51,141,317
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	0	370,000,000	248,987,390	0	248,987,390	67.29	121,012,610
525162	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel BLU	0	4,116,000	0	0	0	0	4,116,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5251	0	14,348,554,000	13,446,419,505	5,145,000	13,441,274,505	93.68	907,279,495
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	12,823,698,000	20,700,647,000	19,356,740,440	16,020,224	19,340,720,216	93.43	1,359,926,784
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2,166,973,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	2,166,973,000	0	0	0	0		0
5371	Belanja Modal BLU							
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	0	14,224,410,000	14,188,176,432	0	14,188,176,432	99.75	36,233,568
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU	0	3,175,100,000	3,044,632,956	0	3,044,632,956	95.89	130,467,044
537115	Belanja Modal Lainnya - BLU	0	458,000,000	451,728,061	0	451,728,061	98.63	6,271,939
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5371	0	17,857,510,000	17,684,537,449	0	17,684,537,449	99.03	172,972,551
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	2,166,973,000	17,857,510,000	17,684,537,449	0	17,684,537,449	99.03	172,972,551
	JUMLAH BELANJA	25,883,981,000	52,130,975,000	50,376,820,644	17,402,643	50,359,418,001	96.6	1,771,556,999

3. SK LAKIP



Kementerian Kesehatan
BPAFK Jakarta

Jl. Percetakan Negara No. 23A
Jakarta Pusat 10570
(021) 4240406
<https://bpafrjakarta.id>

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN JAKARTA
NOMOR : HK.02.03/E.IX/185/2024

TENTANG

TIM PENYUSUN DAN EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIP)
BALAI PENGAMANAN ALAT DAN FASILITAS KESEHATAN JAKARTA

KEPALA BALAI PENGAMANAN ALAT DAN FASILITAS KESEHATAN JAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan merupakan bagian integral dari penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kementerian Kesehatan dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan yang perlu dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Jakarta berkewajiban mempertanggungjawabkan hasil kerjanya dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja kepada Menteri Kesehatan dan menyusun Penetapan Kinerja Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Jakarta ;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b, perlu ditetapkan Tim Penyusun dan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Jakarta yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Jakarta.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
4. Peraturan Menteri Kesehatan RI No.28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silakan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://whs.kemkes.go.id>. Untuk verifikasi keaslian tandatangan elektronik, silakan unggah dokumen pada laman <https://ite.kominfo.go.id/verifyPDE>.



2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);

6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : TIM PENYUSUN DAN EVALUASI LAPORAN AKUNTABILAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIP) BALAI PENGAMANAN ALAT DAN FASILITAS KESEHATAN JAKARTA.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim adalah sebagai berikut :

Ketua : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Anggota : 1. dr Bayu Aji Kelana
2. Emytri, SKM.MKM.
3. Marlina Harahap, ST.M.Si
4. Teti Herwati,SE.
5. Yeni Utirah K,SE.

KETIGA : Tim Penyusun dan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data atau bahan yang diperlukan dalam rangka Penyusunan dan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Kinerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta;
2. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta sebagai pertanggungjawaban Kepala Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta;
3. Menyusun Penetapan Kinerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta.
4. Melakukan Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta
5. Menyusun laporan berkala BPAFK Jakarta (Bulanan, semesteran dan tahunan)
6. Melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Jakarta

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silakan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id>. Untuk verifikasi keaslian tandatangan elektronik, silakan unggah dokumen pada laman <https://ite.kominfo.go.id/verifyPDE>.



- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, TIM Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Penetapan Kinerja bertanggung jawab kepada kepala Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Jakarta.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan kegiatan TIM Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dibebankan kepada DIPA Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Jakarta.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali serta diadakan perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dan perubahan terkait kebijakan atau regulasi yang berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 9 Januari 2024
Kepala Balai Pengamanan Alat
Dan Fasilitas Kesehatan Jakarta



Subadri, ST, M.Si
NIP. 197611122005011003

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silakan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://whs.kemkes.go.id>. Untuk verifikasi keaslian tandatangan elektronik, silakan unggah dokumen pada laman <https://hs.keminfo.go.id/keasfPDF>

